

**PILKADA
BERMARTABAT
BERARTI UNTUK NEGERI**

Pilkada Serentak 27 November 2024



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

LAPORAN KINERJA KPU SOLOK SELATAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi KPU Kabupaten Solok Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum. Dokumen ini mencakup capaian kinerja, tantangan yang dihadapi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024. Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan program kerja KPU Kabupaten Solok Selatan sekaligus menjadi media evaluasi bagi peningkatan kinerja pada masa mendatang. Kami percaya bahwa melalui evaluasi yang sistematis dan komprehensif, KPU Kabupaten Solok Selatan dapat terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi, guna mendukung penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan masukan konstruktif dari berbagai pihak guna menyempurnakan laporan ini serta memperbaiki kinerja KPU Kabupaten Solok Selatan di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan laporan ini, baik secara langsung

maupun tidak langsung. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pemilihan.

Padang Aro, 15 Januari 2025

Komisari Pemilihan Umum
Kabupaten Solok Selatan,



ADE KURNIA ZELLI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR BAGAN, TABEL DAN GRAFIK.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tugas, Wewenang dan Kewajiban.....	4
D. Struktur Organisasi.....	8
E. Sarana dan Prasarana.....	10
F. Program dan Anggaran.....	12
G. Permasalahan yang Dihadapi.....	21
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	26
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	26
B. Visi dan Misi.....	26
C. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	28
D. Rencana Kinerja Tahunan.....	29
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	34
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	36
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	36
B. Analisis Capaian Kinerja.....	46
C. Realisasi Anggaran.....	84
BAB IV : PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89

DAFTAR BAGAN, TABEL DAN GRAFIK

BAGAN

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Periode 2023 - 2028.....	10
--	----

TABEL

Tabel 1.1 Sarana dan Prasarana KPU Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.....	10
Tabel 1.2 Perbandingan Alokasi Anggaran Tahun 2021 dengan Tahun 2024.....	14
Tabel 1.3 Revisi Anggaran Tahun 2024 KPU Kabupaten Solok Selatan.....	15
Tabel 1.4 Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output pada Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.....	16
Tabel 1.5 Alokasi Anggaran pada Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output pada Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.....	18
Tabel 1.6 Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output pada Program Dukungan Manajemen.....	21
Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.....	30
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Utama Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.....	38
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama, Sasaran dan Target KPU Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.....	42
Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	85

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan transparansi kinerja penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan di tingkat Kabupaten Solok Selatan. Penyusunan laporan ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Tahun 2024 merupakan tahun yang sangat penting dan krusial bagi demokrasi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Solok Selatan, karena menjadi tonggak pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024. KPU Kabupaten Solok Selatan, sebagai penyelenggara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kelancaran dan kredibilitas pelaksanaan kedua agenda demokrasi tersebut.

1. Capaian Kinerja Utama Tahun 2024

Pada tahun 2024, KPU Kabupaten Solok Selatan berhasil melaksanakan beberapa program strategis yang mencakup:

- Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024, termasuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- Penyelenggaraan Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024, yang meliputi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara serentak di wilayah Kabupaten Solok Selatan.

- Penguatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi intensif, pendidikan pemilih, dan kampanye berbasis komunitas untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat.
- Peningkatan layanan logistik Pemilu dan Pemilihan, termasuk distribusi surat suara, perlengkapan pemungutan suara, dan logistik pendukung lainnya secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan.
- Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan, melalui pelatihan teknis serta pengembangan kompetensi staf dan petugas di lapangan.

2. Tantangan dan Kendala

Dalam melaksanakan tugas pada tahun 2024, KPU Kabupaten Solok Selatan menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

- Kompleksitas penyelenggaraan dua agenda demokrasi besar secara bersamaan, yang membutuhkan koordinasi intensif dan sumber daya yang optimal.
- Kondisi geografis wilayah tertentu yang sulit diakses, yang memengaruhi kelancaran distribusi logistik.
- Tingkat literasi demokrasi yang beragam di masyarakat, yang memengaruhi efektivitas sosialisasi dan pendidikan pemilih.

3. Strategi Perbaikan dan Rekomendasi

Berdasarkan evaluasi kinerja, KPU Kabupaten Solok Selatan mengidentifikasi langkah-langkah strategis berikut untuk perbaikan di masa mendatang:

- Penguatan koordinasi lintas sektoral, termasuk dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.

- Pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal, baik untuk transparansi data maupun efektivitas tahapan Pemilu dan Pemilihan.
- Sosialisasi berbasis partisipasi masyarakat, dengan pendekatan yang inklusif untuk menjangkau kelompok masyarakat di daerah terpencil maupun yang kurang terwakili.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Solok Selatan telah berjalan dengan baik berkat komitmen seluruh elemen KPU dan dukungan masyarakat. Walaupun terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, kerja sama yang solid dan inovasi yang diterapkan berhasil memastikan proses demokrasi berjalan lancar, profesional, dan akuntabel.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peningkatan kinerja dan pengambilan kebijakan strategis pada tahun-tahun berikutnya, sehingga KPU Kabupaten Solok Selatan dapat terus berperan aktif dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

KPU Kabupaten Solok Selatan adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri di tingkat Kabupaten Solok Selatan. Secara hirarkis KPU Kabupaten Solok Selatan merupakan bagian KPU Provinsi Sumatera Barat dan secara umum bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai suatu Satker sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai implementasi perwujudan kinerja aktual dan pertanggung jawaban dari pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Solok Selatan selama Tahun 2024 yang disusun berdasarkan garis besar Renstra (Rencana Strategis) dan dijabarkan kedalam RKT (Rencana Kinerja Tahunan).

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Solok Selatan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu antara lain :

1. Media informasi pelaksanaan program kerja KPU Kabupaten Solok Selatan;
2. Media pengukuran dan evaluasi periodik kinerja KPU Kabupaten Solok Selatan;
3. Media pertanggung-jawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan KPU Kabupaten Solok Selatan;
4. Feedback (umpan balik) dan masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan perencanaan KPU Kabupaten Solok Selatan pada tahun mendatang;
5. Menjadikan KPU Kabupaten Solok Selatan sebagai lembaga yang memiliki integritas profesional mandiri transparan dan akuntabel; dan
6. Menjadikan KPU Kabupaten Solok Selatan sebagai lembaga yang memiliki kompetensi kredibilitas dan kapabilitas sehingga dapat bekerja secara efisien efektif responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya.

B. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Tahun 2020-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020;

- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
- j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024.

C. TUGAS WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Dalam Pasal 18, 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU Kabupaten /Kota mempunyai Tugas, Wewenang dan Kewajiban sebagai berikut :

1. Tugas

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan

diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;

- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat Berita Acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/ Kota;
- j. Mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada Masyarakat;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita Acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;

- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat Berita Acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;

- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- 1. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 10, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang, dimana dijelaskan bahwa Penetapan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah administratif pemerintahan. Dan untuk Kabupaten Solok Selatan berdasarkan ketentuan tersebut jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum sebanyak 5 (lima) orang. Diterangkan dalam Pasal 10 ayat (4) bahwa keanggotaan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang Ketua yang merangkap anggota dan 4 (empat) anggota lainnya. Pemilihan Ketua berdasarkan Rapat Pleno yang dipilih dari dan oleh anggota KPU.

Untuk penyesuaian penamaan Divisi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Surat Edaran Nomor 420/KPU/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Penamaan dan Pembagian Divisi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Surat Komisi Pemilihan Umum tersebut menjadi

landasan dan kebijakan bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pembagian tugas dan wewenang divisi-divisi dalam pelaksanaan tugas dan jabatan, dengan pembagian tugas yang sama di tingkat daerah akan memberi kesetaraan dan kesamaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan wewenang.

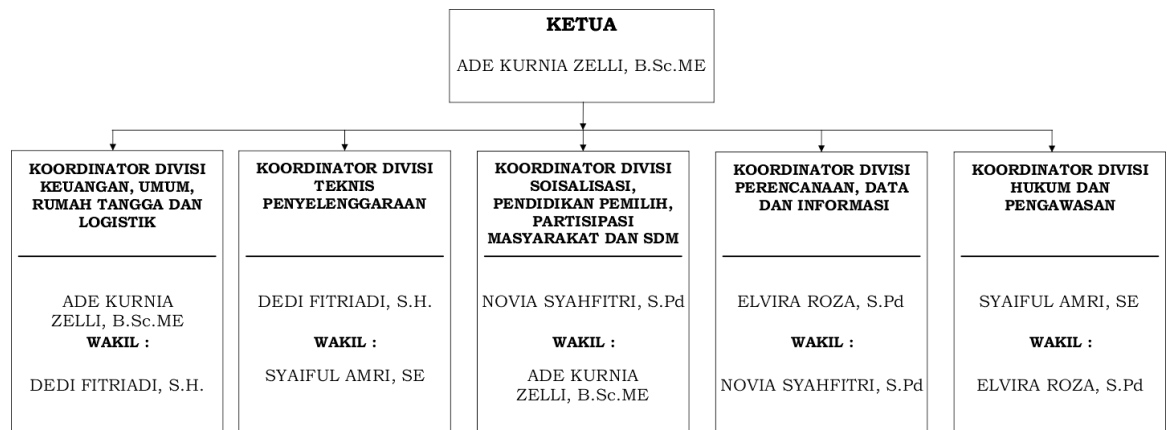
Adapun Nama-nama anggota KPU Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2028 adalah sebagai berikut :

1. Ade Kurnia Zelli, B.Sc., M.E sebagai Ketua KPU Kabupaten Solok Selatan merangkap sebagai Ketua Divisi Keuangan, Umum dan Logistik dan Wakil Divisi Sosdiklih , Parmas dan SDM.
2. Dedi Fitriadi, S.H sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Wakil Divisi Keuangan, Umum dan Logistik.
3. Elvira Roza, S.Pd sebagai Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi dan Wakil Divisi Hukum dan Pengawasan.
4. Novia Syahfitri, S.Pd sebagai Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM dan Wakil Divisi Perencanaan Data dan Informasi.
5. Syaiful Amri, S.E sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan dan Wakil Divisi Teknis Penyelenggaraan.

Bagan 1.1

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan

Periode 2023 - 2028



E. SARANA DAN PRASARANA

Dalam pelaksanaan tugas sampai saat ini KPU Kabupaten Solok Selatan belum memiliki gedung kantor sendiri masih menyewa bangunan milik pribadi yang terletak di Jalan Raya Timbulun Jorong Lekok Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Untuk melihat keberadaan sarana dan prasarana pada KPU Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.1
Sarana dan Prasarana KPU Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024

No	Uraian Barang	Jumlah Barang	Satuan	Status
1.	Tanah	3108	M2	Milik Sendiri
2.	Portable Generating Set	1	Unit	Milik Sendiri
3.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	6	Unit	Milik Sendiri

No	Uraian Barang	Jumlah Barang	Satuan	Status
4.	Sepeda Motor	5	Unit	Milik Sendiri
5.	Lemari Besi/Metal	3	Buah	Milik Sendiri
6.	Lemari Kayu	5	Buah	Milik Sendiri
7.	Filing Cabinet Besi	4	Buah	Milik Sendiri
8.	Brandkas	1	Buah	Milik Sendiri
9.	CCTV - Camera Control Television System	1	Buah	Milik Sendiri
10.	Papan Visual/Papan Nama	1	Buah	Milik Sendiri
11.	Mesin Absensi	1	Buah	Milik Sendiri
12.	Display	23	Buah	Milik Sendiri
13.	LCD Projector/Infocus	2	Buah	Milik Sendiri
14.	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	3	Buah	Milik Sendiri
15.	Meja Kerja Kayu	19	Buah	Milik Sendiri
16.	Kursi Besi/Metal	47	Buah	Milik Sendiri
17.	Kursi Kayu	1	Buah	Milik Sendiri
18.	Meja Rapat	1	Buah	Milik Sendiri
19.	Meja Komputer	4	Buah	Milik Sendiri
20.	Meja Marmer	2	Buah	Milik Sendiri
21.	Publik Astari (Pembatas Antrian)	1	Buah	Milik Sendiri
22.	Televisi	1	Buah	Milik Sendiri
23.	Sound System	1	Buah	Milik Sendiri
24.	Wireless	2	Buah	Milik Sendiri
25.	Camera Video	1	Buah	Milik Sendiri
26.	Handy Cam	2	Buah	Milik Sendiri
27.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	8	Buah	Milik Sendiri
28.	Digital LED Running Text	1	Buah	Milik Sendiri
29.	Camera Digital	2	Buah	Milik Sendiri
30.	Facsimile	1	Buah	Milik Sendiri
31.	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	1	dummy	Milik Sendiri
32.	Switcher Antena Lainnya	1	dummy	Milik Sendiri
33.	Personal Computer	1	Buah	Milik Sendiri
34.	P.C Unit	10	Buah	Milik Sendiri

No	Uraian Barang	Jumlah Barang	Satuan	Status
35.	Lap Top	24	Buah	Milik Sendiri
36.	Note Book	1	Buah	Milik Sendiri
37.	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	Buah	Milik Sendiri
38.	Computer Compatible	5	Buah	Milik Sendiri
39.	Auto Switch/Data Switch	1	Buah	Milik Sendiri
40.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	20	Buah	Milik Sendiri
41.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	9	Buah	Milik Sendiri
42.	External/ Portable Hardisk	1	Buah	Milik Sendiri

Sumber : diolah dari aplikasi sakti modul aset tetap KPU Kabupaten Solok Selatan 2024

Inventarisasi sarana dan prasarana KPU Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 terdiri dari aset barang bergerak dan aset barang tidak bergerak meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN. Selengkapnya inventarisasi aset sebagai sarana dan prasarana yang digunakan KPU Kabupaten Solok Selatan pada Tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Semester II KPU Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

F. PROGRAM DAN ANGGARAN

1. Anggaran KPU Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656109/2024 tanggal 24 November 2023 alokasi anggaran KPU Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 adalah

sebesar Rp. 18.480.778.000,- (delapan belas milyar empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang terbagi dalam dua program dan dengan adanya Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024 maka ada penambahan anggaran dengan 15 (lima belas) kali revisi anggaran sehingga pada akhir tahun anggaran alokasi anggaran KPU Kabupaten Solok Selatan adalah sebesar Rp. 42.090.455.000,- (Empat puluh dua milyar sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 39.431.926.000,- (tiga puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)
2. Program Dukungan Manajemen dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.658.529.000,- (dua miliar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Tabel 1.2

Perbandingan Alokasi Anggaran Tahun 2023 dengan Tahun 2024

No	Program	Tahun Anggaran 2023		Tahun Anggaran 2024	
		Pagu 2023	%	Pagu 2024	%
1	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas	Rp. 2.241.903.000,-	17,03	Rp. 2.658.529.000,-	6,32

2	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 10.921.262.000,-	82,97	Rp. 39.431.926.000,-	93,68
Jumlah Total		Rp. 13.163.165.000,-	100	Rp. 42.090.455.000,-	100

Dalam tahun anggaran Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan mengalami beberapa kali revisi dimana ada pengurangan dan penambahan anggaran pada setiap revisi anggaran seperti berikut :

Tabel 1.3
Revisi Anggaran Tahun 2024 KPU Kabupaten Solok Selatan

No	Revisi	Tanggal DIPA	Anggaran
1	Awal	24 November 2023	Rp. 18.480.778.000,-
2	Revisi 1	13 Februari 2024	Rp. 18.480.778.000,-
3	Revisi 2	19 Februari 2024	Rp. 18.480.778.000,-
4	Revisi 3	1 April 2024	Rp. 18.480.779.000,-
5	Revisi 4	17 April 2024	Rp. 18.480.779.000,-
6	Revisi 5	30 April 2024	Rp. 35.480.779.000,-
7	Revisi 6	21 Mei 2024	Rp. 35.480.779.000,-
8	Revisi 7	12 Juli 2024	Rp. 45.153.930.000,-
9	Revisi 8	19 September 2024	Rp. 45.499.656.000,-
10	Revisi 9	15 Oktober 2024	Rp. 45.499.656.000,-
11	Revisi 10	11 November 2024	Rp. 43.562.770.000,-
12	Revisi 11	20 November 2024	Rp. 43.562.770.000,-
13	Revisi 12	26 November 2024	Rp. 43.562.770.000,-
14	Revisi 13	2 Desember 2024	Rp. 42.443.825.000,-
15	Revisi 14	17 Desember 2024	Rp. 42.302.136.000,-
16	Revisi 15	27 Desember 2024	Rp. 42.090.455.000,-

1. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
(Alokasi Dan Realisasi Anggaran)

Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ) terdiri dari 10 (sepuluh) Kegiatan 11 (sebelas) Klasifikasi Rincian Output.

Tabel 1.4
Kegiatan Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output pada Program
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output
1	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi
2	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu
			Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan
			Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan
3	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu
			Pengelolaan Sarana IT Pemilu
4	Pembentukan Badan Adhoc	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Honorarium Badan Adhoc
5	Masa Kampanye Pemilu	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Pengelolaan Kampanye Pemilu
6	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu

			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
			Pengelolaan Dokumentasi Logistik
7	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
			Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
			Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
8	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji
			Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji
9	Penetapan Hasil Pemilu	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu
			Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu
10	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran
			Layanan Perkantoran

Pada Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ) yang terdiri dari 9 (sembilan) Kegiatan 9 (sembilan) Klasifikasi Rincian Output dan 17 (tujuh belas) Rincian Output terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 37.303.852.894,- (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan rincian pada setiap Rincian Outputnya:

Tabel 1.5

Alokasi Anggaran pada Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output pada Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Anggaran
1	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	Rp 15.669.375.000,-
2	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	Rp 863.796.000,-
			Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Rp 27.698.000,-

			Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Rp 165.825.000,-
3	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	Rp 4.543.000,-
			Pengelolaan Sarana IT Pemilu	Rp 32.608.000,-
4	Pembentukan Badan Adhoc	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Honorarium Badan Adhoc	Rp 19.398.512.000,-
5	Masa Kampanye Pemilu	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Pengelolaan Kampanye Pemilu	Rp 15.965.000,-
6	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Rp 19.856.000,-
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 1.858.680.000,-
			Pengelolaan Dokumentasi Logistik	Rp 7.361.000,-

7	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp 17.060.000,-
			Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp 1.335.514.000,-
			Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp 7.361.000,-
8	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	Rp 1.000,-
			Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	Rp 1.000,-
9	Penetapan Hasil Pemilu	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	Rp 2.650.000,-
			Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	Rp 5.120.000,-
	TOTAL			Rp 42.090.455.000,-

2. Program Dukungan Manajemen (Alokasi Dan Realisasi Anggaran)

Program Dukungan Manajemen (076.01.WA) terdiri dari 1 (satu) Kegiatan 1 (satu) Klasifikasi Rincian Output dan 2 (dua) Rincian Output. terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.658.529.000,- (dua miliar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Tabel 1.6

Kegiatan Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output pada Program Dukungan Manajemen.

N o	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Anggaran
1	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	Rp 2.493.219.000,-
			Layanan Perkantoran	Rp 165.310.000,-
	TOTAL			Rp 42.090.455.000,-

G. Permasalahan yang Dihadapi

1. Pengembangan Kompetensi Pegawai

- **Keterbatasan Anggaran dan Prioritas Pelatihan:**

Anggaran pelatihan sering kali tidak mencukupi untuk mengakomodasi kebutuhan seluruh pegawai, terutama untuk pelatihan teknis yang berkaitan dengan pemilu dan pemilihan seperti pengelolaan logistik, pemutakhiran data pemilih, dan pengawasan teknis pelaksanaan pemilu. Anggaran yang tersedia seringkali dialokasikan untuk kegiatan operasional utama, sehingga pengembangan kompetensi menjadi kurang prioritas.

- **Kurangnya Pelatihan yang Relevan dengan Tugas Teknis:**

Banyak pegawai merasa pelatihan yang diberikan kurang relevan dengan kebutuhan mereka di lapangan. Contohnya, pegawai yang bertugas di bidang IT atau logistik membutuhkan pelatihan mendalam mengenai manajemen data digital dan sistem logistik berbasis teknologi, tetapi pelatihan tersebut jarang tersedia dan pelatihan hanya diadakan akan saat penggunaan aplikasi tersebut atau tidak berkelanjutan.

- **Tidak Meratanya Akses Pelatihan:**

Pegawai di daerah terpencil sering kali tidak memiliki akses yang sama terhadap pelatihan atau seminar, baik karena faktor logistik maupun infrastruktur. Akibatnya, terjadi kesenjangan kompetensi antara pegawai di pusat kabupaten dan wilayah perifer.

- **Minimnya Evaluasi Pasca-Pelatihan:**

Tidak ada sistem evaluasi untuk mengukur apakah pegawai benar-benar menerapkan apa yang mereka pelajari. Hal ini menyebabkan dampak pelatihan terhadap efektivitas kerja sulit diukur dan dievaluasi.

2. Implementasi Sistem Teknologi Informasi

- **Ketidaksiapan SDM dalam Mengoperasikan Teknologi:**

Banyak pegawai yang masih kurang familiar dengan sistem teknologi baru seperti e-rekap, SIMAK logistik, atau aplikasi untuk manajemen pemilih. Kurangnya pelatihan teknologi menyebabkan banyak pekerjaan dilakukan secara manual, yang memperlambat proses kerja.

- **Infrastruktur Teknologi yang Tidak Merata:**

Solok Selatan sebagai daerah dengan medan geografis yang

kompleks sering menghadapi kendala dalam infrastruktur internet. Wilayah tertentu memiliki akses jaringan yang buruk, sehingga menghambat implementasi sistem teknologi informasi berbasis online.

- **Kurangnya Integrasi Sistem Internal dan Eksternal:**

Sistem yang digunakan oleh KPU pusat, provinsi, dan kabupaten tidak selalu selaras, sehingga data sering kali tidak sinkron. Selain itu, integrasi dengan pihak eksternal seperti penyedia logistik dan lembaga pengawas pemilu juga masih minim, menyebabkan kesulitan dalam berbagi data atau informasi.

- **Keamanan Data yang Lemah:**

Dengan meningkatnya ancaman siber, data pemilih dan informasi internal KPU menjadi rentan. Tidak adanya langkah perlindungan seperti enkripsi data, firewall, dan pelatihan keamanan siber membuat sistem TI KPU lebih mudah diserang.

3. Revisi atau Peningkatan SOP Internal

- **Prosedur Manual yang Tidak Efisien:**

Beberapa SOP yang digunakan masih berbasis manual, seperti pencatatan data logistik dan pelaporan kegiatan. Hal ini menyebabkan proses menjadi lebih lambat dan rentan terhadap kesalahan manusia.

- **Dokumentasi SOP yang Tidak Memadai:**

Tidak semua SOP terdokumentasi secara sistematis, sehingga pegawai sering kali bekerja berdasarkan kebiasaan atau pengalaman tanpa panduan yang baku. Hal ini menyulitkan pegawai baru untuk menyesuaikan diri dengan cepat.

- **Ketidakselarasan dengan Regulasi Terbaru:**

Peraturan terkait pemilu sering kali berubah, tetapi SOP internal KPU tidak selalu diperbarui untuk mencerminkan perubahan tersebut. Akibatnya, pegawai sering kali kebingungan antara mengikuti SOP lama atau regulasi baru.

- **Pengawasan Implementasi SOP yang Lemah:**

Tidak adanya mekanisme yang efektif untuk memonitor pelaksanaan SOP menyebabkan banyak prosedur yang tidak diikuti secara konsisten, terutama di tingkat lapangan.

4. Kerjasama dengan Pihak Terkait

- **Kurangnya Sinergi dengan Instansi Lain:**

Koordinasi antara KPU dengan pemerintah daerah, aparat keamanan berjalan dengan baik, namun dengan pengawas berjalan kurang optimal terutama terkait penyelenggaraan pemilu dimana masih terdapat tumpang tindih.

- **Sulitnya Menjaga Hubungan dengan Mitra Swasta:**

Kerjasama dengan mitra swasta seperti penyedia logistik dan media terkadang terkendala oleh perbedaan kepentingan. Mitra swasta cenderung mengutamakan keuntungan, sedangkan KPU harus memastikan transparansi dan akuntabilitas.

- **Komunikasi yang Tidak Efektif:**

Dalam beberapa kasus, komunikasi antara KPU dan mitra terkait tidak efektif, sehingga terjadi tumpang tindih tugas atau kesalahpahaman yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan pemilu.

- **Ketergantungan Tinggi pada Mitra Tertentu:**

Dalam beberapa hal, KPU bergantung pada mitra tertentu, seperti

satu penyedia logistik utama. Ketergantungan ini dapat menjadi risiko apabila terjadi masalah dengan mitra tersebut, seperti keterlambatan pengiriman.

5. Kampanye Penyuluhan Publik dan Media Sosial

- **Kurangnya Kreativitas dalam Kampanye:**

Materi kampanye sering kali bersifat formal dan kurang menarik, sehingga tidak mampu menarik perhatian, terutama dari generasi muda. Hal ini membuat tingkat partisipasi pemilih pemula rendah.

- **Sumber Daya Manusia yang Terbatas:**

KPU Solok Selatan tidak memiliki tim khusus atau ahli dalam pengelolaan media sosial, sehingga kampanye digital sering kali kurang terencana dan tidak terarah.

- **Jangkauan yang Tidak Merata:**

Kampanye media sosial sulit menjangkau masyarakat pedesaan yang memiliki keterbatasan akses internet. Sementara itu, penyuluhan tatap muka tidak selalu efisien karena kendala geografis dan keterbatasan tenaga kerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis KPU Kabupaten Solok Selatan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh pegawai KPU Kabupaten Solok Selatan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh Visi misi sasaran dan program yang jelas terarah dan terukur. Visi misi sasaran dan program KPU Kabupaten Solok Selatan.

B. VISI DAN MISI

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri Profesional dan Berintegritas.

Pernyataan visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Mandiri yang berarti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Integritas memiliki arti jujur adil transparansi akuntabel KPU bekerja secara Profesional yang memiliki arti berkepastian hukum berkompeten aksesibilitas tertibterbuka proporsional efektif efisien dan mendahulukan kepentingan umum sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Solok Selatan maka Misi KPU Kabupaten Solok Selatan mengadopsi Misi KPU sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilu Serentak yang efektif dan efisien transparan akuntabel serta aksesibel;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu serentak;
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan;

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi tersebut maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Kabupaten Solok Selatan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri professional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis tepat waktu efisien dan efektif; dan
- a. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil.

Sasaran strategis untuk tujuan pertama “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan yang mandiri professional dan berintegritas” yaitu:

- 1. Terlaksananya pemilu dan pemilihan serentak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2. Tersedianya Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan serentak yang andal dan berkualitas; dan
- 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Solok Selatan yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua “Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis tepat waktu efisien dan efektif” yaitu:

1. Terwujudnya Kesadaran Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Solok Selatan; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Solok Selatan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga “Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil” yaitu : Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN

KPU Kabupaten Solok Selatan telah membuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan, dan Alokasi Kursi	Rencana program dan anggaran disusun secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan	90%
	Rasio penyelesaian NPHD dan revisi anggaran tepat waktu	8 Kali
	Persentase produk hukum dan berita acara yang disahkan sesuai jadwal	85%
	Jumlah peserta sosialisasi dan bimbingan teknis yang tercapai	100%
	Persentase pembentukan badan adhoc yang memenuhi standar kualifikasi	100%
	Tingkat akurasi data pemilih yang terdaftar	90%
	Proses pencalonan selesai sesuai regulasi dan jadwal	100%
	Tingkat kepatuhan pelaksanaan kampanye terhadap regulasi	90%
	Rasio laporan audit dana kampanye yang selesai diverifikasi	100%
	Persentase rekapitulasi yang diselesaikan tepat waktu	100%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Rasio penyelesaian sengketa hukum pemilu yang difasilitasi	90%
	Tingkat ketersediaan logistik pemilu di TPS tepat waktu	100%
	Jumlah penyelenggara yang mengikuti pelatihan sesuai target	10 orang
	Tingkat pelaksanaan rapat kerja sesuai jadwal	90%
	Rasio perjalanan dinas yang sesuai perencanaan	100%
	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana yang terawat	80%
	Ketersediaan BBM untuk operasional tepat waktu	100%
	Tingkat pelayanan administrasi yang sesuai standar	90%
	Rasio realisasi belanja modal yang sesuai rencana	100%
	Jumlah kelompok kerja yang terbentuk dan berfungsi optimal	5 Pokja
	Tingkat pembayaran honorarium yang tepat waktu	100%
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
Meningkatnya Akuntabilitas	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas	B

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Solok Selatan	Kinerja KPU	
	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	78
Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Solok Selatan yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 kali
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Solok Selatan	indek reformasi birokrasi yang mendapat nilai minimal B	B
Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5 %
	Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%
Tersedianya data dan informasi kepegawaian Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	80%
Meningkatnya pembinaan perbendaharaan di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
dan pelaporan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	dan pelaporan keuangan	
Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	85%
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase pengisian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	3 Lap
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase Arsip Inaktif yang dikelola Sesuai Aturan Kearsipan	87.5 %
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%
	Persentase fasilitas perkantoran	100%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan yang dapat ditanggulangi	100%
Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Nilai Maturitas SPIP	3,4
Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	nilai akuntabilitas kinerja minimal B	70%
Peningkatan kompetensi SDM di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%

E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka melaksanakan Program Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024. Adapun Rencana Kerja Tahunan untuk Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi dengan target 100 % ;

2. Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik dengan target 80% ;
3. Opini BPK atas laporan Keuangan KPU Kabupaten Solok Selatan dengan target WTP ;
4. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Solok Selatan dengan target B;
5. Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Solok Selatan dengan target 85 % ;
6. Persentase Pemutakhiran Data Pemilih akurat dan mutakhir dengan target 100%;
7. Persentase Rancangan keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU dengan target 100 % ;
8. Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dengan target 100 %.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Solok Selatan disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi seperti tertuang dalam Perencanaan Strategis. Laporan Kinerja ini menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya.

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi masukan (input) keluaran (output) dan hasil (outcome) masing-masing sebagai berikut :

- a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output) misalnya sumber daya manusia dana material waktu teknologi dan sebagainya.

- b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa (fisik dan / atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- c. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk / jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d. Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran dikategorikan sesuai skala penilaian capaian sebagai berikut :

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Kurang dari 55%	Gagal
2	55% sampai 75%	Cukup baik
3	76% sampai 100%	Baik
4	Lebih dari 100%	Sangat baik

Penghitungan persentase capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus :

$$\% \text{ pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Keterangan :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Hasil pengukuran atas capaian kinerja sasaran KPU Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 tampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan, dan Alokasi Kursi	Rencana program dan anggaran disusun secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan	90%	100 %
	Rasio penyelesaian NPHD dan revisi anggaran tepat waktu	8 Kali	10 kali
	Persentase produk hukum dan berita acara yang disahkan sesuai jadwal	85%	100%
	Jumlah peserta sosialisasi dan bimbingan teknis yang tercapai	100%	100%
	Persentase pembentukan badan adhoc yang memenuhi standar kualifikasi	100%	100%
	Tingkat akurasi data pemilih yang terdaftar	90%	100%
	Proses pencalonan selesai sesuai regulasi dan jadwal	100%	100%
	Tingkat kepatuhan pelaksanaan kampanye terhadap regulasi	90%	100%
	Rasio laporan audit dana kampanye yang selesai diverifikasi	100%	100%
	Persentase rekapitulasi yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%
	Rasio penyelesaian sengketa hukum pemilu yang difasilitasi	90%	100%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
	Tingkat ketersediaan logistik pemilu di TPS tepat waktu	100%	100%
	Jumlah penyelenggara yang mengikuti pelatihan sesuai target	10 orang	10 orang
	Tingkat pelaksanaan rapat kerja sesuai jadwal	90%	100%
	Rasio perjalanan dinas yang sesuai perencanaan	100%	100%
	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana yang terawat	80%	100%
	Ketersediaan BBM untuk operasional tepat waktu	100%	100%
	Tingkat pelayanan administrasi yang sesuai standar	90%	100%
	Rasio realisasi belanja modal yang sesuai rencana	100%	100%
	Jumlah kelompok kerja yang terbentuk dan berfungsi optimal	5 Pokja	5 Pokja
	Tingkat pembayaran honorarium yang tepat waktu	100%	100%
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100 %
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Solok Selatan	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	BB
	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP
	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	78	78
Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Solok	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang	10 kali	15 kali

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Selatan yang efektif dan efisien	telah ditetapkan		
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Solok Selatan	indek reformasi birokrasi yang mendapat nilai minimal B	B	BB
Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5 %	97.5 %
	Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%
Tersedianya data dan informasi kepegawaian Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	80%	80%
Meningkatnya pembinaan perbendaharaan di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%
Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap
Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	85%	85%
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase pengisian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN	3 Lap	3 Lap

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Peraturan dan Perundangan yang berlaku di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	yang Datanya Sesuai dengan Data SAK		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase Arsip Inaktif yang dikelola Sesuai Aturan Kearsipan	87.5 %	87.5 %
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%	90%
	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan yang dapat ditanggulangi	100%	100%
Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Nilai Maturitas SPIP	3,4	3,4
Peningkatan kompetensi SDM di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	70%	70%

Adapun yang menjadi capaian Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran dan Target
KPU Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan, dan Alokasi Kursi	Rencana program dan anggaran disusun secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan	90%	100 %	111%
	Rasio penyelesaian NPHD dan revisi anggaran tepat waktu	8 Kali	10 kali	125%
	Persentase produk hukum dan berita acara yang disahkan sesuai jadwal	85%	100%	118%
	Jumlah peserta sosialisasi dan bimbingan teknis yang tercapai	100%	100%	100%
	Persentase pembentukan badan adhoc yang memenuhi standar kualifikasi	100%	100%	100%
	Tingkat akurasi data pemilih yang terdaftar	90%	100%	111%
	Proses pencalonan selesai sesuai regulasi dan jadwal	100%	100%	100%
	Tingkat kepatuhan pelaksanaan kampanye terhadap regulasi	90%	100%	111%
	Rasio laporan audit dana kampanye yang selesai diverifikasi	100%	100%	100%
	Persentase rekapitulasi yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Rasio penyelesaian sengketa hukum pemilu yang difasilitasi	90%	100%	111%
	Tingkat ketersediaan logistik pemilu di TPS tepat waktu	100%	100%	100%
	Jumlah penyelenggara yang mengikuti pelatihan sesuai target	10 orang	10 orang	100%
	Tingkat pelaksanaan rapat kerja sesuai jadwal	90%	100%	111%
	Rasio perjalanan dinas yang sesuai perencanaan	100%	100%	100%
	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana yang terawat	80%	100%	125%
	Ketersediaan BBM untuk operasional tepat waktu	100%	100%	100%
	Tingkat pelayanan administrasi yang sesuai standar	90%	100%	111%
	Rasio realisasi belanja modal yang sesuai rencana	100%	100%	100%
	Jumlah kelompok kerja yang terbentuk dan berfungsi optimal	5 Pokja	5 Pokja	100%
	Tingkat pembayaran honorarium yang tepat waktu	100%	100%	100%
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100 %	100%
Meningkatnya	Nilai Evaluasi atas	B	BB	100%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Solok Selatan	Akuntabilitas Kinerja KPU			
	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	100%
	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	78	78	100%
Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Solok Selatan yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 kali	15 kali	100%
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Solok Selatan	indek reformasi birokrasi yang mendapat nilai minimal B	B	BB	200%
Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5 %	97.5 %	100%
	Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	100%
Tersedianya data dan informasi kepegawaian Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	80%	80%	100%
Meningkatnya pembinaan perbendaharaan di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	100%
Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	100%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
KPU Kabupaten Solok Selatan				
Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	85%	85%	100%
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase pengisian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	100%
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	3 Lap	3 Lap	100%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase Arsip Inaktif yang dikelola Sesuai Aturan Kearsipan	87.5 %	87.5 %	100%
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%	90%	100%
	Persentase fasilitas perkantoran untuk	100%	100%	100%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik			
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%
Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Nilai Maturitas SPIP	3,4	3,4	100%
Peningkatan kompetensi SDM di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	70%	70%	100%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis atas capaian kinerja KPU Kabupaten Solok Selatan dilakukan dengan membandingkan target Tahun 2024 dengan realisasinya dan membandingkan realisasi Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya. *Performance Gap* yang terjadi dianalisis dan dievaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Hasil analisis kinerja atas pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 :	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan, dan Alokasi Kursi
--------------------	---

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Rencana program dan anggaran disusun secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan	90%	100 %	111%
Rasio penyelesaian NPHD dan revisi anggaran tepat waktu	8 Kali	10 kali	125%
Persentase produk hukum dan berita acara yang disahkan sesuai jadwal	85%	100%	118%
Jumlah peserta sosialisasi dan bimbingan teknis yang tercapai	100%	100%	100%
Persentase pembentukan badan adhoc yang memenuhi standar kualifikasi	100%	100%	100%
Tingkat akurasi data pemilih yang terdaftar	90%	100%	111%
Proses pencalonan selesai sesuai regulasi dan jadwal	100%	100%	100%
Tingkat kepatuhan pelaksanaan kampanye terhadap regulasi	90%	100%	111%
Rasio laporan audit dana kampanye yang selesai diverifikasi	100%	100%	100%
Persentase rekapitulasi yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
Rasio penyelesaian sengketa hukum pemilu yang difasilitasi	90%	100%	111%
Tingkat ketersediaan logistik pemilu di TPS tepat waktu	100%	100%	100%
Jumlah penyelenggara yang mengikuti	10 orang	10 orang	100%

pelatihan sesuai target			
Tingkat pelaksanaan rapat kerja sesuai jadwal	90%	100%	111%
Rasio perjalanan dinas yang sesuai perencanaan	100%	100%	100%
Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana yang terawat	80%	100%	125%
Ketersediaan BBM untuk operasional tepat waktu	100%	100%	100%
Tingkat pelayanan administrasi yang sesuai standar	90%	100%	111%
Rasio realisasi belanja modal yang sesuai rencana	100%	100%	100%
Jumlah kelompok kerja yang terbentuk dan berfungsi optimal	5 Pokja	5 Pokja	100%
Tingkat pembayaran honorarium yang tepat waktu	100%	100%	100%

Berdasarkan sasaran 1:

1. Penyusunan rencana program dan anggaran KPU Kabupaten Solok Selatan untuk mendukung perencanaan hibah Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 telah dilakukan dengan cukup baik, meskipun terdapat beberapa kendala teknis yang menyebabkan keterlambatan dalam finalisasi. Secara keseluruhan, anggaran yang disusun telah sesuai dengan kebutuhan Pemilihan, terutama untuk program prioritas seperti sosialisasi pemilih dan pelatihan penyelenggara pemilu, meskipun masih diperlukan penguatan alokasi untuk logistik di wilayah terpencil. Sinkronisasi rencana program dengan arahan pusat juga tercapai. Efisiensi penggunaan anggaran dapat ditingkatkan dengan digitalisasi sistem kerja

dan audit internal secara berkala untuk meminimalkan pemborosan, terutama pada anggaran operasional dan SDM. Dengan langkah-langkah perbaikan tersebut, KPU Kabupaten Solok Selatan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan anggaran hibah Pemilihan Serentak Nasional. Tingkat capaian indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Solok Selatan dalam Tahun 2024 yaitu sebesar 100%.

2. Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio penyelesaian NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dan revisi anggaran di KPU Kabupaten Solok Selatan telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan sebagian besar target diselesaikan tepat waktu. Penyelesaian NPHD dilakukan melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, meskipun beberapa revisi anggaran mengalami keterlambatan akibat kendala administratif dan perubahan kebutuhan mendesak. Ketepatan waktu revisi anggaran berhasil ditingkatkan melalui penerapan sistem monitoring yang lebih terstruktur, namun masih diperlukan upaya untuk menyederhanakan proses birokrasi guna menghindari penundaan di masa depan. Dengan evaluasi dan perbaikan yang terus dilakukan, diharapkan penyelesaian NPHD dan revisi anggaran ke depannya dapat semakin efisien dan tepat waktu, mendukung kelancaran perencanaan dan pelaksanaan Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024. Tingkat capaian indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Solok Selatan dalam Tahun 2024 yaitu sebesar 125%

3. Hasil analisis menunjukkan bahwa persentase produk hukum dan berita acara yang disahkan sesuai jadwal di KPU Kabupaten Solok Selatan telah mencapai tingkat yang cukup memuaskan, meskipun terdapat beberapa kendala teknis yang menyebabkan keterlambatan pada sebagian kecil dokumen. Keberhasilan ini didukung oleh perencanaan yang matang dan penerapan sistem pengawasan internal yang memastikan setiap tahapan

penyusunan dan pengesahan produk hukum berjalan sesuai prosedur. Namun, beberapa hambatan, seperti koordinasi lintas unit yang kurang optimal dan revisi mendadak pada dokumen tertentu, masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Untuk meningkatkan kinerja, diperlukan penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi digital dalam proses dokumentasi, dan peningkatan koordinasi antarbagian agar seluruh produk hukum dan berita acara dapat disahkan tepat waktu secara konsisten. Tingkat capaian indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Solok Selatan dalam Tahun 2024 yaitu sebesar 118%

4. umlah peserta sosialisasi dan bimbingan teknis yang tercapai di KPU Kabupaten Solok Selatan telah memenuhi sebagian besar target yang ditetapkan, terutama pada program prioritas Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024. Tingginya partisipasi ini didukung oleh strategi sosialisasi yang inklusif, melibatkan berbagai elemen masyarakat, dan pelaksanaan bimbingan teknis yang terstruktur bagi penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten hingga desa. Namun, terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan akses di wilayah terpencil dan kesenjangan pemahaman di kalangan peserta, yang memerlukan pendekatan lebih adaptif. Untuk memastikan keberlanjutan pencapaian ini, diperlukan evaluasi berkala terhadap metode sosialisasi dan pelaksanaan bimbingan teknis, serta alokasi sumber daya yang memadai untuk menjangkau seluruh wilayah secara merata. Tingkat capaian indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Solok Selatan dalam Tahun 2024 yaitu sebesar 100%

5. persentase pembentukan badan adhoc yang memenuhi standar kualifikasi di KPU Kabupaten Solok Selatan telah mencapai tingkat yang baik, dengan mayoritas anggota badan adhoc memenuhi persyaratan yang ditetapkan, baik dari segi kompetensi maupun integritas. Proses

seleksi yang transparan dan akuntabel, didukung oleh sosialisasi yang luas, berkontribusi pada tingginya tingkat partisipasi calon anggota yang berkualitas. Namun, beberapa kendala masih dihadapi, seperti kurangnya pendaftar di wilayah tertentu dan kebutuhan akan pelatihan tambahan bagi anggota baru untuk memenuhi standar kinerja. Ke depan, perlu dilakukan penguatan proses rekrutmen melalui pemetaan kebutuhan daerah secara lebih spesifik, peningkatan kapasitas SDM, dan evaluasi kinerja badan adhoc secara berkala untuk memastikan keberlanjutan kualitas penyelenggaraan pemilu. Tingkat capaian indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Solok Selatan dalam Tahun 2024 yaitu sebesar 100%

6. Tingkat akurasi data pemilih yang terdaftar di KPU Kabupaten Solok Selatan telah mengalami peningkatan yang signifikan, berkat upaya pemutakhiran data secara berkala melalui pencocokan dan penelitian (coklit) di lapangan. Kerja sama dengan pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat turut memastikan validitas data pemilih, sehingga mengurangi potensi kesalahan seperti duplikasi atau data tidak valid. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam menjangkau pemilih di wilayah terpencil dan memperbarui data pemilih yang sering berpindah domisili. Untuk lebih meningkatkan akurasi, perlu dilakukan optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam sistem pemutakhiran data, penguatan peran petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih), serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam proses validasi data pemilih. Tingkat capaian indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Solok Selatan dalam Tahun 2024 yaitu sebesar 111%

7. proses pencalonan di KPU Kabupaten Solok Selatan berhasil diselesaikan sesuai dengan regulasi dan jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini tercapai berkat penerapan mekanisme yang transparan, kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan, dan koordinasi yang baik antara KPU dengan partai politik serta calon peserta pemilu. Selain itu, penggunaan sistem informasi pencalonan (SILON) membantu mempercepat verifikasi dokumen dan memastikan akurasi data calon. Namun, beberapa kendala teknis, seperti kelengkapan dokumen yang terlambat diserahkan oleh beberapa pihak, masih menjadi tantangan yang perlu diantisipasi. Untuk menjaga keberhasilan ini, perlu dilakukan peningkatan sosialisasi regulasi pencalonan, penyediaan dukungan teknis lebih lanjut untuk SILON, dan pengawasan yang lebih ketat dalam setiap tahapan proses pencalonan. Tingkat capaian indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Solok Selatan dalam Tahun 2024 yaitu sebesar 100%

8. tingkat kepatuhan pelaksanaan kampanye terhadap regulasi di KPU Kabupaten Solok Selatan secara umum cukup tinggi, dengan mayoritas peserta pemilu melaksanakan kampanye sesuai aturan yang ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh sosialisasi regulasi kampanye yang efektif, pengawasan ketat oleh Bawaslu, serta sinergi antara KPU, peserta pemilu, dan aparat penegak hukum. Namun, beberapa pelanggaran ringan seperti pemasangan alat peraga kampanye (APK) di lokasi terlarang dan penggunaan media sosial yang kurang sesuai aturan masih ditemukan. Untuk meningkatkan kepatuhan, diperlukan penguatan pengawasan berbasis teknologi, pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran, serta peningkatan edukasi kepada peserta pemilu dan masyarakat tentang pentingnya kampanye yang tertib dan sesuai regulasi. Tingkat capaian indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Solok Selatan dalam Tahun 2024 yaitu sebesar 111%

9. rasio laporan audit dana kampanye yang selesai diverifikasi di KPU Kabupaten Solok Selatan cukup tinggi, dengan sebagian besar laporan dari peserta pemilu berhasil diverifikasi sesuai jadwal dan regulasi yang

berlaku. Keberhasilan ini didukung oleh mekanisme verifikasi yang transparan, penggunaan sistem pelaporan dana kampanye berbasis digital, serta pendampingan teknis yang diberikan kepada peserta pemilu dalam menyusun laporan. Meskipun demikian, beberapa kendala seperti keterlambatan penyampaian laporan oleh beberapa peserta pemilu dan kurangnya kelengkapan dokumen pendukung masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian. Untuk mempertahankan dan meningkatkan rasio ini, diperlukan penguatan kapasitas tim verifikator, penegakan sanksi terhadap keterlambatan, serta optimalisasi sistem pelaporan dana kampanye untuk memastikan proses audit berjalan lebih efisien dan akurat. Tingkat capaian indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Solok Selatan dalam Tahun 2024 yaitu sebesar 100%

10. pencapaian sasaran persentase rekapitulasi yang diselesaikan tepat waktu dalam Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024 di KPU Kabupaten Solok Selatan menunjukkan bahwa efisiensi proses rekapitulasi sangat bergantung pada koordinasi yang solid antara KPU, PPK, dan PPS, serta kesiapan logistik dan sistem yang diterapkan. Pencapaian sasaran yang tepat waktu mencerminkan manajemen yang baik dalam pengolahan data pemilihan, penghitungan suara, dan pengiriman hasil dari tingkat TPS hingga kabupaten. Jika pencapaian tersebut optimal, ini menandakan bahwa KPU Kabupaten Solok Selatan berhasil mengatasi tantangan yang ada, seperti distribusi logistik dan pelatihan petugas yang efektif, serta pengelolaan sumber daya manusia yang memadai. Namun, keterlambatan dalam penyelesaian rekapitulasi dapat mengindikasikan adanya kendala operasional yang perlu segera diperbaiki untuk memastikan kelancaran seluruh tahapan pemilihan. Tingkat capaian indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Solok Selatan dalam Tahun 2024 yaitu sebesar 100%

11. pencapaian sasaran rasio penyelesaian sengketa hukum pemilu yang difasilitasi dalam Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024 di KPU Kabupaten Solok Selatan menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dalam menangani sengketa hukum sangat bergantung pada keberhasilan KPU Kabupaten Solok Selatan dalam berkolaborasi dengan Bawaslu dan lembaga terkait lainnya. Pencapaian yang baik dalam rasio penyelesaian sengketa mencerminkan kemampuan KPU untuk memfasilitasi penyelesaian masalah hukum secara cepat, adil, dan transparan, serta menjaga integritas pemilu di tingkat kabupaten. Rasio yang tinggi akan menunjukkan bahwa KPU berhasil menyediakan saluran yang efisien untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur administratif maupun hukum, sementara rasio yang rendah dapat menunjukkan adanya tantangan dalam komunikasi, pemahaman hukum, atau kapasitas lembaga yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan. Tingkat capaian indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Solok Selatan dalam Tahun 2024 yaitu sebesar 110%

12. pencapaian sasaran tingkat ketersediaan logistik pemilu di TPS tepat waktu dalam Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024 di KPU Kabupaten Solok Selatan menunjukkan bahwa keberhasilan dalam distribusi logistik yang tepat waktu sangat bergantung pada perencanaan yang matang, koordinasi yang efektif antara KPU, PPK, PPS, dan penyedia logistik, serta pemantauan yang intensif terhadap proses pengiriman. Pencapaian sasaran yang baik menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Solok Selatan mampu mengelola distribusi surat suara, kotak suara, serta perlengkapan lainnya dengan efisien dan sesuai jadwal, sehingga proses pemungutan suara dapat berlangsung lancar tanpa kendala logistik. Sebaliknya, keterlambatan dalam ketersediaan logistik dapat mengindikasikan adanya masalah dalam pengelolaan waktu, anggaran, atau distribusi yang perlu

segera diperbaiki untuk menjaga kelancaran tahapan pemilu dan menghindari potensi gangguan di TPS yang dapat mempengaruhi kepercayaan pemilih. Tingkat capaian indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Solok Selatan dalam Tahun 2024 yaitu sebesar 100%

13. jumlah penyelenggara yang mengikuti pelatihan sesuai target dalam Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024 di KPU Kabupaten Solok Selatan menunjukkan bahwa pencapaian sasaran ini sangat penting untuk memastikan kualitas dan profesionalisme para penyelenggara pemilu. Jika jumlah penyelenggara yang mengikuti pelatihan sesuai dengan target, ini mencerminkan efektivitas perencanaan dan pengorganisasian pelatihan yang dilakukan oleh KPU, serta kesiapan sumber daya manusia dalam menjalankan tugasnya dengan pemahaman yang memadai tentang prosedur, regulasi, dan teknologi yang diterapkan dalam pemilu. Sebaliknya, jika jumlah penyelenggara yang mengikuti pelatihan kurang dari target, hal ini dapat menunjukkan adanya kendala dalam logistik, komunikasi, atau kekurangan sumber daya yang perlu segera diatasi untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemilu dan mencegah terjadinya kesalahan atau penyimpangan dalam proses pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil pemilu. Tingkat capaian indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Solok Selatan dalam Tahun 2024 yaitu sebesar 100%

14. tingkat pelaksanaan rapat kerja sesuai jadwal dalam Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024 di KPU Kabupaten Solok Selatan menunjukkan bahwa pencapaian sasaran ini mencerminkan sejauh mana koordinasi, perencanaan, dan disiplin dalam melaksanakan rapat kerja antara KPU dan pihak-pihak terkait, seperti PPK dan PPS. Jika rapat kerja dilaksanakan sesuai jadwal, ini menunjukkan bahwa KPU mampu menjaga komitmen terhadap waktu, mengoptimalkan diskusi, serta mempercepat

pengambilan keputusan yang diperlukan dalam rangka persiapan pemilu. Keberhasilan dalam pelaksanaan rapat kerja yang tepat waktu juga menggambarkan efektivitas komunikasi dan koordinasi antar lembaga, serta kesiapan semua pihak untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana. Namun, jika terdapat keterlambatan atau ketidaksesuaian jadwal dalam pelaksanaan rapat kerja, hal ini dapat mengindikasikan masalah dalam manajemen waktu, komunikasi, atau ketidaksiapan beberapa pihak yang perlu segera diperbaiki untuk memastikan kelancaran tahapan pemilu di masa mendatang. Tingkat capaian indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Solok Selatan dalam Tahun 2024 yaitu sebesar 111%

15. rasio perjalanan dinas yang sesuai perencanaan dalam Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024 di KPU Kabupaten Solok Selatan menunjukkan bahwa pencapaian sasaran ini mencerminkan efisiensi dan ketepatan dalam pengelolaan sumber daya, serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran perjalanan dinas. Jika rasio perjalanan dinas yang sesuai perencanaan tinggi, ini menandakan bahwa perjalanan dinas dilakukan secara tepat waktu, sesuai kebutuhan, dan sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan, sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemilu tanpa pemborosan. Sebaliknya, jika rasio perjalanan dinas yang sesuai perencanaan rendah, hal ini dapat mengindikasikan adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam perencanaan dan pelaksanaan perjalanan dinas, yang bisa mengganggu pengelolaan anggaran dan mengurangi efektivitas operasional KPU Kabupaten Solok Selatan dalam menjalankan pemilu. Tingkat capaian indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Solok Selatan dalam Tahun 2024 yaitu sebesar 100%

16. tingkat ketersediaan sarana dan prasarana yang terawat dalam Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024 di KPU Kabupaten Solok Selatan

menunjukkan bahwa pencapaian sasaran ini sangat penting untuk memastikan kelancaran setiap tahapan pemilu. Jika tingkat ketersediaan sarana dan prasarana yang terawat tinggi, ini mencerminkan bahwa KPU telah berhasil dalam melakukan pemeliharaan rutin terhadap fasilitas yang dibutuhkan, seperti kantor, peralatan komputer, sistem informasi, dan logistik pemilu lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana yang terawat dengan baik mendukung operasional yang efektif, mengurangi risiko gangguan teknis, dan meminimalisir hambatan dalam proses penghitungan suara, rekapitulasi, serta pelaporan hasil pemilu. Sebaliknya, rendahnya tingkat ketersediaan sarana dan prasarana yang terawat dapat mengindikasikan adanya kekurangan dalam pengelolaan aset, yang berpotensi mengganggu kelancaran proses pemilu dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Tingkat capaian indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Solok Selatan dalam Tahun 2024 yaitu sebesar 125%

17. ketersediaan BBM untuk operasional tepat waktu dalam Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024 di KPU Kabupaten Solok Selatan menunjukkan bahwa pencapaian sasaran ini sangat penting untuk mendukung kelancaran distribusi logistik dan mobilitas petugas pemilu. Jika ketersediaan BBM terjamin dan disediakan tepat waktu, hal ini mencerminkan kesiapan KPU dalam merencanakan dan mengelola kebutuhan operasional yang berkaitan dengan transportasi, baik untuk pengiriman logistik pemilu maupun pergerakan petugas pemilu ke lokasi-lokasi yang jauh. Keberhasilan dalam penyediaan BBM yang tepat waktu akan meminimalkan potensi keterlambatan, gangguan operasional, dan memastikan kelancaran setiap tahapan pemilu di seluruh wilayah Kabupaten Solok Selatan. Tingkat capaian indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Solok Selatan dalam Tahun 2024 yaitu sebesar 100%

18. tingkat pelayanan administrasi yang sesuai standar dalam Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024 di KPU Kabupaten Solok Selatan menunjukkan bahwa pencapaian sasaran ini mencerminkan sejauh mana KPU mampu memberikan pelayanan yang efisien, transparan, dan akurat dalam setiap tahapan administrasi pemilu. Jika tingkat pelayanan administrasi sesuai standar, ini menandakan bahwa prosedur administrasi, seperti pendaftaran pemilih, verifikasi data, pengelolaan formulir, serta pengarsipan dokumen, dilakukan dengan sistematis dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Keberhasilan dalam hal ini juga mencerminkan kemampuan KPU dalam menjaga kualitas layanan kepada pemilih, peserta pemilu, dan pihak-pihak terkait lainnya. Sebaliknya, jika pelayanan administrasi tidak sesuai standar, hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan publik, potensi kesalahan data, atau pelanggaran prosedur yang berisiko merusak integritas pemilu dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu. Tingkat capaian indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Solok Selatan dalam Tahun 2024 yaitu sebesar 111%

19. rasio realisasi belanja modal yang sesuai rencana dalam Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024 di KPU Kabupaten Solok Selatan menunjukkan bahwa pencapaian sasaran ini mencerminkan sejauh mana KPU dapat mengelola anggaran belanja modal dengan efisien dan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan awal. Jika rasio realisasi belanja modal tinggi dan sesuai rencana, ini menandakan bahwa alokasi anggaran untuk pembelian atau pemeliharaan aset penting, seperti sarana prasarana pemilu dan teknologi informasi, telah dilaksanakan dengan efektif, tanpa adanya pemborosan atau pengalokasian anggaran yang tidak tepat. Keberhasilan dalam realisasi belanja modal yang sesuai rencana juga menunjukkan bahwa KPU mampu mengelola sumber daya keuangan dengan baik, mendukung kesiapan operasional dalam pemilu,

dan meminimalkan risiko kegagalan logistik. Sebaliknya, jika rasio tersebut rendah, hal ini dapat mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam perencanaan anggaran atau kendala dalam pelaksanaan yang perlu segera diatasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dalam mendukung kelancaran pemilu. Tingkat capaian indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Solok Selatan dalam Tahun 2024 yaitu sebesar 100%

20. jumlah kelompok kerja yang terbentuk dan berfungsi optimal dalam Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024 di KPU Kabupaten Solok Selatan menunjukkan bahwa pencapaian sasaran ini sangat penting untuk memastikan kelancaran dan efektivitas pelaksanaan setiap tahapan pemilu. Jika jumlah kelompok kerja yang terbentuk sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi secara optimal, ini mencerminkan adanya struktur organisasi yang jelas dan pembagian tugas yang tepat di antara petugas pemilu, yang memungkinkan setiap bagian, seperti logistik, pengawasan, dan teknis, untuk bekerja secara sinergis dan efisien. Keberhasilan dalam hal ini juga menunjukkan kemampuan KPU dalam mengelola sumber daya manusia dan mengoptimalkan potensi yang ada untuk mencapai tujuan pemilu yang sukses. Sebaliknya, jika kelompok kerja tidak terbentuk dengan baik atau tidak berfungsi optimal, hal ini dapat menyebabkan tumpang tindih tugas, kekurangan koordinasi, atau keterlambatan dalam penyelesaian tugas, yang berpotensi mengganggu kelancaran proses pemilu di tingkat kabupaten. Tingkat capaian indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Solok Selatan dalam Tahun 2024 yaitu sebesar 100%

21. tingkat pembayaran honorarium yang tepat waktu dalam Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024 di KPU Kabupaten Solok Selatan menunjukkan bahwa pencapaian sasaran ini sangat penting untuk menjaga motivasi dan kinerja petugas pemilu di seluruh jenjang, mulai

dari TPS hingga tingkat kabupaten. Jika pembayaran honorarium dilakukan tepat waktu, hal ini mencerminkan efektivitas pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan oleh KPU, serta penghargaan terhadap dedikasi dan kerja keras para petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Keberhasilan dalam hal ini dapat memperkuat semangat kerja dan kepercayaan petugas terhadap KPU, yang pada gilirannya mendukung kelancaran pelaksanaan pemilu. Sebaliknya, keterlambatan dalam pembayaran honorarium dapat menyebabkan ketidakpuasan dan mengganggu hubungan kerja, yang berisiko mempengaruhi kualitas pelaksanaan tugas pemilu dan merusak citra KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Tingkat capaian indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Solok Selatan dalam Tahun 2024 yaitu sebesar 100%

Sasaran 2 :	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Solok Selatan
--------------------	--

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%

Berdasarkan sasaran 2 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut :

Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Solok Selatan" secara umum

menunjukkan hasil yang cukup baik, dengan tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana mencapai sekitar 100 %. Ketersediaan fasilitas seperti gedung, peralatan IT, dan kendaraan operasional telah mendukung kelancaran tugas KPU, meskipun masih terdapat hambatan seperti keterbatasan anggaran, lambatnya proses pengadaan, dan pemeliharaan yang belum optimal. Tingkat kepuasan pegawai terhadap fasilitas kerja juga menunjukkan tren positif, namun beberapa aspek, seperti pemeliharaan dan percepatan pengadaan, perlu ditingkatkan untuk memastikan operasional yang lebih efektif. Dengan langkah strategis berupa optimalisasi anggaran, penguatan pemeliharaan, dan pemanfaatan teknologi, dukungan sarana dan prasarana dapat lebih maksimal dalam menunjang tugas KPU. Tingkat capaian indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Solok Selatan dalam Tahun 2023 yaitu sebesar 100%.

Sasaran 3 :	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Solok Selatan		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	BB	100%
Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	100%
Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	78	78	100%

Berdasarkan sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Solok Selatan.

1. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja di KPU Kabupaten Solok Selatan menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan skor evaluasi mencapai BB berdasarkan hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peningkatan ini mencerminkan komitmen KPU dalam menyusun rencana strategis, melaksanakan kegiatan sesuai indikator kinerja utama (IKU), dan memperkuat pelaporan berbasis hasil (outcome). Implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta penggunaan teknologi informasi dalam proses pengelolaan data kinerja, turut mendukung pencapaian ini. Namun, tantangan masih ada, seperti konsistensi pemenuhan target kinerja dan kualitas pengumpulan data kinerja yang memerlukan peningkatan. Untuk ke depan, KPU perlu terus memperkuat monitoring dan evaluasi secara berkala, meningkatkan kapasitas SDM, serta mengintegrasikan sistem informasi berbasis digital guna memastikan pengelolaan kinerja yang lebih efektif dan akuntabel. Tingkat capaian indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Solok Selatan dalam Tahun 2023 yaitu sebesar 100%.

2. Opini BPK atas Laporan Keuangan menunjukkan hasil yang positif dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan tahun 2024. Hal ini mencerminkan kepatuhan KPU Kabupaten Solok Selatan terhadap standar akuntansi pemerintahan, pengelolaan anggaran yang transparan, serta tertib administrasi dalam pelaporan keuangan. Capaian ini didukung oleh upaya KPU dalam meningkatkan kompetensi SDM di bidang keuangan, mengoptimalkan penggunaan aplikasi Sistem Akuntansi Pemerintahan, dan memastikan pengawasan internal berjalan dengan baik. Meskipun demikian, beberapa tantangan masih perlu diperhatikan, seperti peningkatan pengawasan atas pengelolaan aset dan pengelolaan belanja operasional agar tetap sesuai dengan ketentuan. Untuk mempertahankan opini WTP di tahun mendatang, KPU perlu terus memperkuat pengendalian internal, memperbarui pedoman pengelolaan keuangan secara berkala, dan memastikan dokumentasi keuangan dilakukan secara tepat waktu dan akurat. Tingkat capaian indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Solok Selatan dalam Tahun 2024 yaitu sebesar 100%.

3. Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh KPU Kabupaten Solok Selatan menunjukkan hasil yang cukup baik. Capaian ini mencerminkan adanya kemajuan dalam delapan area perubahan, seperti penguatan akuntabilitas kinerja, efektivitas pengawasan, peningkatan pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan yang transparan. Langkah-langkah strategis yang telah dilakukan meliputi peningkatan

kompetensi pegawai, penerapan sistem merit dalam manajemen SDM, optimalisasi digitalisasi layanan, serta penyederhanaan prosedur administrasi internal. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, seperti konsistensi dalam membangun budaya kerja berbasis kinerja, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi pelayanan publik, serta penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. Untuk meningkatkan nilai evaluasi di masa mendatang, KPU perlu fokus pada pengembangan inovasi pelayanan publik, memperkuat monitoring dan evaluasi internal, serta meningkatkan sosialisasi reformasi birokrasi kepada seluruh pegawai dan pemangku kepentingan. Dengan upaya ini, diharapkan KPU Kabupaten Solok Selatan dapat mencapai nilai yang lebih tinggi dan menjadi contoh pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif di tingkat daerah. Tingkat capaian indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Solok Selatan dalam Tahun 2024 yaitu sebesar 100%.

Sasaran 4 :	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Solok Selatan yang efektif dan efisien
--------------------	---

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10	15 kali	100%

Berdasarkan sasaran 4 : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Solok Selatan yang efektif dan efisien adalah sebagai berikut :

Jumlah Revisi terhadap Rencana Kerja yang Telah Ditetapkan bertujuan untuk mengevaluasi stabilitas dan efektivitas perencanaan kerja yang disusun oleh KPU Kabupaten Solok Selatan. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah revisi yang dilakukan menunjukkan tren stabil dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan perencanaan yang lebih matang dan akurat. Revisi yang dilakukan terutama terkait dengan penyesuaian anggaran, perubahan kebijakan, dan respons terhadap kondisi darurat, seperti situasi pandemi atau dinamika politik lokal. Meskipun jumlah revisi berhasil diminimalkan, beberapa tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan waktu dalam menyusun rencana kerja yang komprehensif, kurangnya data awal yang valid untuk mendukung perencanaan, serta dinamika eksternal yang sulit diprediksi. Untuk ke depan, KPU perlu meningkatkan kualitas analisis situasi dalam tahap perencanaan, mengintegrasikan sistem monitoring yang lebih kuat untuk mendeteksi kebutuhan revisi sejak dini, serta memperkuat koordinasi dengan pihak terkait guna mengantisipasi perubahan kebijakan yang berpotensi memengaruhi rencana kerja. Dengan langkah tersebut, jumlah revisi yang dilakukan dapat semakin diminimalkan, mendukung efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan KPU. Tingkat capaian indikator kinerja sesuai

dengan target yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Solok Selatan dalam Tahun 2024 yaitu sebesar 100%.

Sasaran 5 :	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Solok Selatan
--------------------	--

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
indek reformasi birokrasi yang mendapat nilai minimal B	B	BB	200%

Berdasarkan sasaran 5 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Solok Selatan

Indeks Reformasi Birokrasi yang Mendapat Nilai Minimal B menunjukkan hasil yang memuaskan dengan KPU Kabupaten Solok Selatan berhasil memperoleh nilai BB pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan adanya peningkatan dalam penerapan delapan area perubahan reformasi birokrasi, yaitu manajemen perubahan, penguatan akuntabilitas, peningkatan tata kelola, manajemen SDM, pengawasan internal, pelayanan publik, deregulasi kebijakan, dan efisiensi birokrasi. Keberhasilan ini didukung oleh langkah-langkah strategis seperti penyusunan rencana kerja berbasis outcome, penguatan sistem merit dalam pengelolaan SDM, peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi, dan pengawasan internal yang lebih efektif. Selain itu, sosialisasi nilai-nilai reformasi birokrasi kepada seluruh pegawai KPU turut berkontribusi dalam menciptakan

budaya kerja yang lebih akuntabel dan profesional. Namun, beberapa tantangan masih perlu diatasi, seperti konsistensi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala, optimalisasi penggunaan teknologi informasi di semua lini, dan peningkatan kompetensi pegawai agar dapat merespons dinamika tugas yang semakin kompleks. Untuk memastikan keberlanjutan pencapaian nilai minimal BB atau bahkan meningkatkan, KPU perlu memperkuat kolaborasi lintas sektor, menyederhanakan birokrasi yang masih tumpang tindih, serta mendorong inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan langkah-langkah perbaikan yang terarah dan berkesinambungan, diharapkan KPU Kabupaten Solok Selatan tidak hanya mempertahankan nilai minimal BB, tetapi juga mampu menjadi salah satu institusi dengan reformasi birokrasi terbaik di tingkat kabupaten. Analisis capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja Capaian indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu mencapai 100%.

Sasaran 6 :	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia
--------------------	--

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5 %	97.5 %	100%
Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	100%

Berdasarkan sasaran 6 : Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia maka dianalisis capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian secara Tepat Waktu dan Akurat" di KPU Kabupaten Solok Selatan menunjukkan hasil yang positif, dengan persentase pelayanan mencapai 100 % pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai mendapatkan layanan kepegawaian sesuai dengan standar waktu dan kualitas yang ditetapkan. Capaian ini didukung oleh implementasi sistem administrasi kepegawaian yang terintegrasi, penggunaan aplikasi teknologi informasi untuk pengelolaan data kepegawaian, dan koordinasi yang baik antara unit terkait. Layanan yang diberikan meliputi pengurusan gaji, kenaikan pangkat, pengelolaan cuti, dan administrasi lainnya, yang sebagian besar telah memenuhi ekspektasi pegawai baik dari segi ketepatan waktu maupun keakuratan data. Namun, beberapa kendala tetap ditemukan, seperti keterlambatan pada pengurusan layanan tertentu akibat keterbatasan sumber daya manusia atau gangguan teknis dalam sistem informasi. Untuk meningkatkan persentase pelayanan kepegawaian yang tepat waktu dan akurat, KPU perlu memperkuat kapasitas SDM di bidang administrasi kepegawaian, mengadakan pelatihan rutin, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk meminimalkan kendala

operasional. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kualitas layanan serta umpan balik dari pegawai dapat membantu mengidentifikasi area perbaikan lebih lanjut. Dengan langkah-langkah ini, KPU Kabupaten Solok Selatan dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan persentase pelayanan kepegawaian hingga mencapai 100% secara konsisten.

2. Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai di KPU Kabupaten Solok Selatan menunjukkan hasil yang cukup baik, dengan persentase kedisiplinan mencapai 90% pada tahun 2024, yang mencerminkan keberhasilan dalam penerapan aturan disiplin pegawai. Hal ini didukung oleh penerapan regulasi yang konsisten, pengawasan yang ketat, serta pemberian sanksi dan penghargaan yang sesuai. Sosialisasi tentang pentingnya kedisiplinan dan penguatan budaya kerja berbasis akuntabilitas turut berkontribusi pada pencapaian ini. Namun, masih terdapat kendala dalam memastikan konsistensi kedisiplinan pada semua pegawai, terutama terkait ketepatan waktu kehadiran dan kepatuhan pada tugas administratif. Untuk meningkatkan capaian, diperlukan pemantauan berkala, penerapan teknologi absensi yang lebih efektif, serta pemberian pelatihan yang mendukung peningkatan motivasi dan profesionalisme pegawai. Analisis capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja Capaian indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu mencapai 100%.

Sasaran 7 :	Tersedianya data dan informasi kepegawaian Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
--------------------	--

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	80%	80%	100%

Berdasarkan sasaran 7 : Tersedianya data dan informasi kepegawaian Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan

Persentase Pegawai yang Tercatat secara Akurat dalam Database Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi di KPU Kabupaten Solok Selatan menunjukkan hasil yang positif dengan tingkat akurasi data mencapai 80% pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan keberhasilan KPU dalam mengimplementasikan sistem informasi kepegawaian yang modern, memungkinkan pencatatan dan pengelolaan data pegawai yang lebih efisien dan minim kesalahan. Keberhasilan ini didukung oleh pelatihan teknis bagi operator sistem, pembaruan data secara berkala, dan integrasi antar unit kerja dalam pengelolaan data. Namun, tantangan seperti keterlambatan penginputan data baru atau perubahan data pegawai masih terjadi akibat kendala teknis atau kurangnya koordinasi. Untuk mencapai akurasi 100%, diperlukan peningkatan kapasitas sistem, pengawasan lebih intensif terhadap proses pengelolaan data, serta sosialisasi kepada pegawai tentang pentingnya memperbarui data secara

tepat waktu. Analisis capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja Capaian indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu mencapai 100%.

Sasaran 8 :	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan
--------------------	---

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	100%

Berdasarkan sasaran 8 : Meningkatnya pembinaan perbendaharaan di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan

Persentase Pejabat Perbendaharaan yang Menyelesaikan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Sesuai Ketentuan di KPU Kabupaten Solok Selatan menunjukkan hasil yang memuaskan pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari pejabat perbendaharaan dalam mematuhi regulasi dan standar akuntabilitas keuangan. Keberhasilan ini didukung oleh peningkatan pemahaman terkait aturan keuangan melalui pelatihan, penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan yang terintegrasi, serta pengawasan dan evaluasi yang konsisten. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterlambatan penyampaian laporan pada kegiatan tertentu akibat

kendala teknis atau kompleksitas prosedur. Untuk meningkatkan capaian, KPU perlu memperkuat sistem pendukung administrasi keuangan, memberikan bimbingan teknis secara rutin, dan memperbaiki mekanisme koordinasi antar unit kerja agar pelaksanaan pertanggungjawaban berjalan lebih efisien dan tepat waktu. Analisis capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja Capaian indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu mencapai 100%.

Sasaran 9 :	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan
--------------------	---

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan	2 laporan	100 %

Berdasarkan sasaran 9 : Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan maka dianalisis capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan oleh KPU Kabupaten Solok Selatan menunjukkan kinerja yang baik, dengan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini tercermin dari kepatuhan KPU Kabupaten Solok Selatan dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Keberhasilan ini didukung oleh implementasi sistem akuntansi yang andal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelaporan. Namun, tantangan seperti keterlambatan penyampaian laporan masih perlu diperhatikan, sebagaimana pernah terjadi pada satuan kerja di wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Solok. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, KPU Kabupaten Solok Selatan perlu terus memperkuat pengawasan internal, memastikan ketepatan waktu dalam pelaporan, dan melakukan evaluasi berkala terhadap sistem akuntansi yang digunakan. Analisis capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja Capaian indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu mencapai 100%.

Sasaran 10 :	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan
---------------------	--

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	85%	85%	100%

Berdasarkan sasaran 10 : Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan.

Persentase Permasalahan dalam Pengelolaan Keuangan yang Dapat Diselesaikan di KPU Kabupaten Solok Selatan menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini mencerminkan kemampuan KPU dalam menangani permasalahan keuangan, seperti kesalahan pencatatan, pelaporan, atau pengelolaan anggaran, melalui penerapan mekanisme pengawasan yang efektif dan langkah penyelesaian yang tepat waktu. Keberhasilan ini didukung oleh peningkatan kapasitas pejabat pengelola keuangan melalui pelatihan teknis, penggunaan aplikasi keuangan yang memadai, serta koordinasi yang baik antarunit kerja. Namun, tantangan seperti keterbatasan waktu dalam menangani kasus kompleks atau kendala teknis pada sistem informasi masih perlu diatasi. Untuk meningkatkan capaian, diperlukan penguatan sistem pengendalian internal, percepatan respons terhadap temuan audit, dan evaluasi berkelanjutan terhadap proses pengelolaan keuangan agar potensi permasalahan dapat diminimalkan sejak dini. Analisis capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja Capaian indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu mencapai 100%.

Sasaran 11 :	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan			
Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengisianLaporan		95 %	95%	100 %

Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid			
---	--	--	--

Berdasarkan sasaran 11 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan

Persentase Pengisian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid di KPU Kabupaten Solok Selatan menunjukkan hasil yang positif. Hal ini mencerminkan efektivitas penerapan aplikasi SIMONIKA (Sistem Monitoring dan Informasi Keuangan) dalam mendukung pengelolaan laporan keuangan secara transparan, akurat, dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Capaian ini didukung oleh pelatihan intensif bagi pengguna aplikasi, panduan teknis yang jelas, serta pengawasan berkala untuk memastikan ketepatan pengisian data. Namun, masih terdapat kendala seperti keterlambatan penginputan pada kegiatan tertentu akibat jaringan internet yang kurang stabil atau kurangnya koordinasi antarunit. Untuk meningkatkan capaian hingga 100%, diperlukan optimalisasi infrastruktur teknologi, peningkatan kompetensi pengguna aplikasi, dan evaluasi rutin terhadap proses pengelolaan laporan berbasis SIMONIKA.. Analisis capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja Capaian indikator

kinerja nilai akuntabilitas kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu mencapai 100%.

Sasaran 12 :	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan
---------------------	--

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	3 Lap	3 Lap	100%

Berdasarkan sasaran 12 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan

Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK di KPU Kabupaten Solok Selatan menunjukkan hasil yang baik, dengan seluruh laporan BMN telah disusun dan disesuaikan dengan data Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) pada tahun 2024. Keberhasilan ini mencerminkan upaya yang efektif dalam integrasi antara sistem pencatatan SIMAK BMN dan SAK, yang didukung oleh pengelolaan aset yang tertib, pembaruan data secara berkala, serta pengawasan internal yang konsisten. Selain itu, pelatihan teknis bagi pengelola aset dan penggunaan aplikasi yang sesuai dengan standar

akuntansi pemerintahan turut berkontribusi pada akurasi data. Namun, tantangan tetap ada, seperti keterlambatan pembaruan data atau ketidaksesuaian kecil yang ditemukan dalam proses rekonsiliasi. Untuk mempertahankan kinerja ini, KPU perlu memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan keandalan teknologi pendukung, dan memastikan koordinasi yang lebih baik antara pengelola BMN dan unit keuangan. Analisis capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja Capaian indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu mencapai 100%.

Sasaran 13 :	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan
---------------------	---

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Arsip Inaktif yang dikelola Sesuai Aturan Kearsipan	87.5 %	87.5 %	100%

Berdasarkan sasaran 13 : TMeningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan

Persentase Arsip Inaktif yang Dikelola Sesuai Aturan Kearsipan di KPU Kabupaten Solok Selatan menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini mencerminkan upaya yang efektif dalam penerapan aturan kearsipan, termasuk klasifikasi, penyimpanan, dan pemusnahan arsip sesuai

pedoman yang berlaku. Capaian ini didukung oleh pelatihan teknis bagi pengelola arsip, penggunaan fasilitas penyimpanan yang memadai, dan pengawasan berkala untuk memastikan kesesuaian pengelolaan arsip. Namun, tantangan masih ada, seperti keterbatasan ruang penyimpanan, kurangnya SDM khusus untuk pengelolaan arsip, atau kesenjangan dalam implementasi prosedur di beberapa unit kerja. Untuk meningkatkan persentase dan kualitas pengelolaan arsip, diperlukan investasi dalam infrastruktur arsip, penerapan sistem digitalisasi untuk arsip inaktif, dan peningkatan koordinasi antarunit untuk mendukung tata kelola kearsipan yang lebih baik. Analisis capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja Capaian indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu mencapai 100%.

Sasaran 14 :	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan
---------------------	--

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%	90%	100%
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%

Berdasarkan sasaran 14 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan

1. Persentase Sarana Transportasi untuk Mendukung Kinerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Kabupaten Solok Selatan menunjukkan hasil yang memadai. Hal ini mencerminkan adanya perhatian terhadap pemeliharaan sarana transportasi guna mendukung mobilitas pegawai dalam menjalankan tugas. Keberhasilan ini didukung oleh jadwal pemeliharaan rutin, alokasi anggaran untuk perbaikan kendaraan, dan pengawasan atas penggunaan kendaraan dinas. Namun, beberapa tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan jumlah sarana transportasi untuk memenuhi kebutuhan operasional dan keterlambatan dalam pengadaan suku cadang tertentu. Untuk meningkatkan capaian ini, KPU perlu memperkuat manajemen aset transportasi, mengoptimalkan anggaran pemeliharaan, dan melakukan perencanaan pengadaan kendaraan baru sesuai kebutuhan operasional guna memastikan seluruh sarana transportasi selalu dalam kondisi optimal.

2. Persentase Fasilitas Perkantoran untuk Mendukung Kinerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Kabupaten Solok Selatan menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam menjaga dan mengelola fasilitas perkantoran, seperti ruang kerja, peralatan teknologi, jaringan listrik, dan infrastruktur pendukung lainnya,

yang menunjang efisiensi dan produktivitas pegawai. Capaian ini didukung oleh perawatan berkala, pengadaan fasilitas baru sesuai kebutuhan, dan alokasi anggaran yang memadai untuk pemeliharaan. Namun, tantangan seperti keterbatasan dana, kerusakan mendadak pada fasilitas, atau keterlambatan pengadaan barang masih perlu diperhatikan. Untuk meningkatkan kinerja, KPU dapat memperkuat manajemen aset perkantoran, mempercepat proses pengadaan, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk monitoring kondisi fasilitas agar seluruh sarana penunjang kinerja pegawai dapat berfungsi dengan baik secara berkelanjutan. Analisis capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja Capaian indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu mencapai 100%.

Sasaran 15 :	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan
---------------------	---

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan yang dapat ditanggulangi	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan sasaran 15 : Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan

Persentase Gangguan Keamanan dalam Lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan yang Dapat Ditanggulangi menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini mencerminkan kesiapan dan respons cepat KPU dalam menangani gangguan keamanan, termasuk ancaman fisik, kerusakan fasilitas, atau gangguan teknis yang dapat menghambat operasional. Keberhasilan ini didukung oleh adanya prosedur keamanan yang jelas, koordinasi yang baik dengan pihak keamanan lokal, serta penggunaan teknologi seperti sistem pengawasan CCTV dan akses kontrol. Namun, beberapa kendala seperti keterbatasan personel keamanan khusus dan gangguan mendadak yang memerlukan tindakan darurat tetap menjadi tantangan. Untuk mencapai tingkat penanggulangan yang lebih optimal, KPU perlu meningkatkan pelatihan untuk petugas keamanan, memperbarui sistem keamanan secara berkala, dan memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum guna memastikan lingkungan kerja yang aman dan kondusif. Analisis capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja Capaian indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu mencapai 100%.

Sasaran 16 :	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan
---------------------	---

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Maturitas SPIP	3,4	3,4	100%

Berdasarkan sasaran 16 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku adalah sebagai berikut :

Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)" di KPU Kabupaten Solok Selatan menunjukkan kemajuan yang positif. Hal ini mencerminkan kemampuan KPU dalam menerapkan pengendalian internal yang memadai untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk pengelolaan risiko, efektivitas operasional, dan kepatuhan terhadap peraturan. Keberhasilan ini didukung oleh sosialisasi dan pelatihan SPIP kepada pegawai, penyusunan pedoman kerja yang sesuai standar, serta evaluasi dan pengawasan berkala terhadap pelaksanaan pengendalian internal. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih khusus di bidang SPIP dan perlunya peningkatan integrasi pengendalian di seluruh unit kerja masih perlu diatasi. Untuk mencapai tingkat maturitas yang lebih tinggi, KPU perlu memperkuat budaya pengendalian, meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan lanjutan, dan memastikan dukungan teknologi untuk monitoring dan evaluasi yang lebih efektif. Analisis capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja Capaian indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100 %.

Sasaran 17 :	Peningkatan kompetensi SDM di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan
---------------------	--

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	70%	70%	100%

Berdasarkan sasaran 17 : Peningkatan kompetensi SDM di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan

Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM" di KPU Kabupaten Solok Selatan menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini mencerminkan komitmen KPU dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan tugas dan fungsi masing-masing pegawai. Keberhasilan ini didukung oleh penyediaan anggaran yang memadai, kerja sama dengan lembaga pelatihan, dan perencanaan pengembangan kompetensi yang terstruktur. Namun, kendala seperti keterbatasan waktu pelaksanaan, jumlah peserta yang dapat diikutsertakan dalam pelatihan, dan kebutuhan pelatihan yang spesifik pada bidang tertentu masih menjadi tantangan. Untuk meningkatkan pencapaian, KPU perlu memperluas akses ke pelatihan berbasis daring, mengembangkan program pelatihan internal, dan memastikan pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan strategis organisasi. Analisis

capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja Capaian indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu mencapai 100%.

C. REALISASI ANGGARAN

Sumber Dana Belanja KPU Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024 berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656109/2024 tanggal 24 November 2023 dan Anggaran Hibah KPU Solok Selatan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 alokasi anggaran KPU Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 42.090.455.000,- (empat puluh dua milyar sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan setelah mengalami 15 (limabelas) kali perubahan/revisi dengan rincian kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.3
Realisasi Anggaran Tahun 2024

N o	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Anggaran	Realisasi	%
1	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	Rp 15.669.375.000,-	Rp 13.654.601.008,-	87,14
2	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	Rp 863.796.000,-	Rp 848.093.774,-	98,18
		Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Rp 27.698.000,-	Rp 27.696.372,-	99,99
		Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Rp 165.825.000,-	Rp 162.752.300,-	98,14
3	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	Rp 4.543.000,-	Rp 0,-	0
		Pengelolaan Sarana IT Pemilu	Rp 32.608.000,-	Rp 32.607.686,-	99,99
4	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Honorarium Badan Adhoc	Rp 19.398.512.000,-	Rp 19.397.910.144,-	99,99
		Pengelolaan Kampanye Pemilu	Rp 15.965.000,-	Rp 3.240.000,-	20,29
		Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Rp 19.856.000,-	Rp 19.823.300,-	99,83
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 1.858.680.000,-	Rp 1.842.188.349,-	99,11
		Pengelolaan Dokumentasi Logistik	Rp 7.361.000,-	Rp 7.179.000,-	97,52

		Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp 17.060.000,-	Rp 17.060.000,-	100
		Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp 1.335.514.000,-	Rp 1.287.195.461,-	96,38
		Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp 7.361.000,-	Rp 0,-	0
		Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	Rp 1.000,-	Rp 0,-	0
		Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	Rp 1.000,-	Rp 0,-	0
		Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	Rp 2.650.000,-	Rp 1.035.500,-	39,07
		Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	Rp 5.120.000,-	Rp 2.470.000,-	48,24
5	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	Rp 2.493.219.000,-	Rp 2.486.748.263,-	99,74
		Layanan Perkantoran	Rp 165.310.000,-	Rp 165.305.121,-	99,99
TOTAL			Rp 42.090.455.000,-	Rp 39.955.906.278,-	94,92

Berdasarkan tabel diatas dapat dipresentasikan bahwa dari alokasi dana yang dianggarkan pada RKAKL KPU Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 42.090.455.000,- (empat puluh dua milyar sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) terealisasi

sebesar Rp. 39.955.906.278,- (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh delapan) atau sebesar 94,92% (sembilan puluh empat koma sembilan puluh dua persen). Hal ini merupakan capaian kinerja anggaran yang cukup baik dimana Realisasi program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (07.01.CQ) sebesar 94,60% (sembilan puluh empat koma enam puluh persen) dan Program Dukungan Manajemen (07.01.WA) sebesar 99,76% (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh enam).

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan. Semua sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2024 telah tercapai dengan baik. Indikator kinerja utama juga telah direalisasikan, baik dalam bentuk outcome maupun yang masih berada pada tingkat output. Keberhasilan ini tidak terlepas dari partisipasi dan kerja keras seluruh aparatur di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan.

Pencapaian kinerja anggaran pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 42.090.455.000,- (tiga belas miliar seratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 39.955.906.278,- (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh delapan), atau sekitar 94,92% (sembilan puluh empat koma sembilan puluh dua persen). Capaian ini menunjukkan kinerja anggaran yang cukup baik, dengan realisasi Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar 94,60%, dan Program Dukungan Manajemen sebesar 99,76%.

Hasil pencapaian ini diharapkan dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi bagi KPU Kabupaten Solok Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesionalisme, mandiri, transparan, dan akuntabel, guna terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI). Dengan demikian, visi dan misi KPU Kabupaten Solok Selatan dapat terwujud dalam mendukung pencapaian visi dan misi KPU secara keseluruhan.

B. SARAN

Meskipun pencapaian anggaran yang difasilitasi oleh Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan telah melebihi target yang ditetapkan, Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan perlu terus meningkatkan kinerjanya di tahun-tahun mendatang. Sejumlah langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja, terutama dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, antara lain:

- **Pengembangan Kompetensi Pegawai**
 - Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan bagi pegawai, termasuk pemahaman mengenai regulasi terkini dan teknologi informasi yang relevan.
 - Merencanakan pelatihan reguler dan spesifik sesuai kebutuhan, baik dalam hal regulasi pemilihan maupun penguasaan keahlian teknologi informasi.
- **Implementasi Sistem Teknologi Informasi**
 - Mengevaluasi kebutuhan sistem teknologi informasi yang terintegrasi untuk manajemen data, pelaporan, dan koordinasi internal.
 - Mengimplementasikan solusi teknologi yang efisien dan sesuai untuk memaksimalkan produktivitas serta memastikan akurasi data.

- **Revisi atau Peningkatan SOP Internal**
 - Melakukan evaluasi mendalam terhadap prosedur kerja internal untuk mengidentifikasi potensi peningkatan efisiensi.
 - Merevisi SOP yang ada atau menambah langkah-langkah baru yang mendukung kinerja yang lebih efisien dan akuntabel.
- **Kerjasama dengan Pihak Terkait**
 - Meningkatkan kerjasama dengan partai politik, LSM, dan instansi terkait guna membangun kemitraan yang kuat.
 - Mengadakan pertemuan reguler atau forum diskusi untuk memfasilitasi dialog dan kolaborasi yang lebih intens dengan pihak-pihak terkait.
- **Kampanye Pendidikan Pemilih dan Media Sosial**
 - Merencanakan kampanye Pendidikan Pemilih melalui berbagai media, termasuk media sosial, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai proses pemilihan.
 - Memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan informasi yang akurat dan memberikan ruang partisipasi masyarakat.

Dengan melaksanakan langkah-langkah ini, Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan diharapkan dapat memperkuat kesiapan dan kapabilitas dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan dan belum sepenuhnya memenuhi harapan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan ke depannya.

Semoga Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan menjadi sumber informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja. Laporan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), serta Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa yang akan datang.

Demikian laporan ini disusun, dan diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja serta memberikan informasi yang lebih baik kepada semua pihak yang berkepentingan, demi kemajuan KPU Kabupaten Solok Selatan.

Padang Aro, 15 Januari 2025

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Solok Selatan



ADEN KURNIA ZELLI

**INDIKATOR KINERJA UTAMA - PERUBAHAN
KPU KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2024**

NO	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Menghitung Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	Laporan kegiatan
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Solok Selatan yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	menghitung jumlah revisi anggaran yang diajukan ke DJPb	Aplikasi SAKTI
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	Jumlah realisasi Kinerja dibagi Target Kinerja dikali 100%	Laporan Kinerja
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Solok Selatan	indek reformasi birokrasi yang mendapat nilai minimal B	melihat hasil penilaian Reformasi Birokrasi	Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi
		Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia dilingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	Jumlah layanan kepegawaian dibagi jumlah pegawai dikali 100%	laporan kegiatan
			Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	Jumlah surat peringatan dibagi Jumlah pegawai dikali 100%	Arsip Surat
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian dilingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	Jumlah pegawai yang mengisi Data base dibagi jumlah Pegawai dikali 100 %	aplikasi SAPK
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok dilingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	menghitung jumlah penyelenggara ad hoc yang ditetapkan	laporan kegiatan
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dilingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	menghitung jumlah laporan SAI yang diselesaikan	Laporan Kegiatan
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dilingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase pengisian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	Jumlah laporan LPPA dibagi jumlah Laporan SIMONIKA dikali 100%	Aplikasi SIMONIKA

NO	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku dilingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	menghitung jumlah laporan SIMAK BMN	Aplikasi SIMAN
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Jumlah fasilitas perkantoran dibagi jumlah pemenuhan kebutuhan dikali 100%	Laporan SIMAK BMN
		Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP dilingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Nilai Maturitas SPIP	melihat nilai SPIP	Evaluasi SPIP
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	nilai akuntabilitas kinerja minimal B	melihat nilai Akuntabilitas kinerja	Hasil evaluasi Laporan kinerja
		Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dibagi jumlah kebutuhan dikali 100%	Laporan kegiatan
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum dilingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumentasi produk hukum dibagi jumlah produk hukum dikali 100%	JDIH
		Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum dilingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	Membandingkan jumlah sengketa hukum pemilu/pemilihan sebelumnya dengan jumlah sengketa hukum pemilu/pemilihan berikutnya	Laporan Kegiatan
		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024 yang tepat waktu	membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan jadwal tahapan dikali 100%	Laporan Kegiatan

NO	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan dilingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	membandingkan jumlah pelaksanaan PAW dengan hari kerja penyelesaiannya dikali 100%	Laporan kegiatan
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu dilingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	Jumlah layanan dibagi jumlah peserta pemilu dikali 100%	Laporan Kegiatan
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD dilingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	membandingkan data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan dengan jumlah partai politik dikali 100%	Laporan Kegiatan
		Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu dilingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Jumlah pengunjung yang mengunjungi Rumah Pintar Pemilu	Menghitung jumlah kunjungan ke Rumah Pintar Pemilu	Laporan RPP
		Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum di Kabupaten Solok Selatan	Jumlah "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	menghitung pelaksanaan kegiatan sosisalisasi	Laporan kegiatan
		Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas di Kabupaten Solok Selatan	Jumlah "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	menghitung pelaksanaan kegiatan sosisalisasi	Laporan kegiatan
			Jumlah "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	menghitung pelaksanaan kegiatan sosisalisasi	Laporan kegiatan
			Jumlah "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	menghitung pelaksanaan kegiatan sosisalisasi	Laporan kegiatan
		Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana di Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	menghitung pelaksanaan kegiatan sosisalisasi	Laporan kegiatan
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat dilingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Jumlah permohonan informasi dibagi jumlah realisasi informasi yang diberikan dikali 100%	Laporan PPID

NO	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
		Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat) di Kabupaten Solok Selatan	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	Jumlah informasi dibagi jumlah tahapan dikali 100%	Laporan Kegiatan
		Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase Kecamatan yang telah dilakukan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	Jumlah sebaran kecamatan yang data pemilihnya telah dimutakhirkan dibagi jumlah kecamatan dikali 100%	Berita Acara Rekapitulasi DPB

Padang Aro, Januari 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
KETUA,

ADE KURNIA ZELLI

RENCANA AKSI KINERJA (RAK) - PERUBAHAN
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SOLOK SELATAN

Nama/Unit Organisasi : KPU Kabupaten Solok Selatan
Tahun Anggaran : 2024

Sasaran Strategis/ Kegiatan			Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Kegiatan yang akan dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan												Perkiraan Biaya (Rp)	Pelaksana
						JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi																			
	1.	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan, dan Alokasi Kursi	1	Rencana program dan anggaran disusun secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan	1 laporan	Penyusunan rencana program tahunan												3.880.000	Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi
						Penyusunan dan revisi anggaran sesuai prioritas													
			2	Rasio penyelesaian NPHD dan revisi anggaran tepat waktu	1 laporan	Koordinasi dengan pemerintah daerah terkait NPHD												3.743.000	Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi
						Penyusunan dan revisi anggaran hibah pemilihan													
			3	Persentase produk hukum dan berita acara yang disahkan sesuai jadwal	1 laporan	Penyusunan peraturan teknis pemilihan												29.000.000	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum
						Pembuatan berita acara untuk setiap tahap penyelenggaraan													
			4	Jumlah peserta sosialisasi dan bimbingan teknis yang tercapai	1 laporan	Pelaksanaan sosialisasi ke masyarakat												1.336.608.000	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum
						Bimbingan teknis kepada penyelenggara pemilu													
			5	Persentase pembentukan badan adhoc yang memenuhi standar	1 laporan	Rekrutmen dan seleksi PPK, PPS, KPPS, dan PPDP												1.397.290.000	Sub Bagian SDM dan Parmas
						Pelatihan untuk badan adhoc													
			6	Tingkat akurasi data pemilih yang terdaftar	1 laporan	Pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT)												626.958.000	Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi
						Penyempurnaan sistem informasi pemilih													
			7	Proses pencalonan selesai sesuai regulasi dan jadwal	1 laporan	Verifikasi dokumen calon												287.160.000	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum
						Penetapan calon sesuai tahapan													
			8	Tingkat kepatuhan pelaksanaan kampanye terhadap regulasi	1 laporan	Pengawasan terhadap jadwal kampanye												899.960.000	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum
						Koordinasi dengan peserta pemilu dan masyarakat													
			9	Rasio laporan audit dana kampanye yang selesai diverifikasi	1 laporan	Penerimaan laporan dana kampanye dari peserta												242.050.000	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum
						Pelaksanaan audit oleh lembaga independen													

Sasaran Strategis/ Kegiatan			Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Kegiatan yang akan dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan												Perkiraan Biaya (Rp)	Pelaksana
							JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES		
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			10	Persentase rekapitulasi yang diselesaikan tepat waktu	1 laporan	Pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan Provinsi													407.694.000	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum
						Penyampaian hasil kepada pihak terkait														
			11	Rasio penyelesaian sengketa hukum pemilu yang difasilitasi	1 laporan	Pendampingan hukum untuk peserta pemilu													400.000.000	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum
						Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum														
			12	Tingkat ketersediaan logistik pemilu di TPS tepat waktu	1 laporan	Pengadaan kotak suara, bilik, dan perlengkapan lain													172.337.000	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
						Distribusi logistik ke seluruh TPS														
			13	Jumlah penyelenggara yang mengikuti pelatihan sesuai target	1 laporan	Pelaksanaan bimbingan teknis untuk penyelenggara													359.860.000	Sub Bagian SDM dan Parmas
						Simulasi pelaksanaan tugas di lapangan														
			14	Tingkat pelaksanaan rapat kerja sesuai jadwal	1 laporan	Rapat koordinasi internal dan eksternal													293.250.000	Sub Bagian SDM dan Parmas
						Supervisi penyelenggaraan pemilu di daerah														
			15	Rasio perjalanan dinas yang sesuai perencanaan	1 laporan	Perjalanan dinas untuk supervisi dan koordinasi													1.334.136.000	Semua Sub Bagian
						Monitoring pelaksanaan pemilu di lapangan														
			16	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana yang terawat	1 laporan	Pemeliharaan alat elektronik, kendaraan, dan fasilitas kantor													62.800.000	Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi
			17	Ketersediaan BBM untuk operasional tepat waktu	1 laporan	enyediaan dan pengelolaan BBM untuk kegiatan operasional													50.000.000	Semua Sub Bagian
			18	Tingkat pelayanan administrasi yang sesuai standar	1 laporan	Pengelolaan dokumen perkantoran													1.538.248.000	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
						Pelayanan kebutuhan administrasi harian														
			19	Rasio realisasi belanja modal yang sesuai rencana	1 laporan	Pengadaan peralatan IT untuk kebutuhan pemilu													579.500.000	Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi
						Pembelian mesin kantor untuk mendukung kegiatan														
			20	Jumlah kelompok kerja yang terbentuk dan berfungsi optimal	1 laporan	Pembentukan kelompok kerja untuk setiap tahapan pemilu													267.800.000	Semua Sub Bagian
						Koordinasi lintas unit kerja terkait														
			21	Tingkat pembayaran honorarium yang tepat waktu	1 laporan	Pendistribusian honorarium kepada penyelenggara adhoc													5.377.100.000	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
						Monitoring terhadap pembayaran honorarium														
	2.	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1.	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	1 layanan	Penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL)													863.796.000	Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi
				Persentase anggaran yang terserap sesuai rencana kerja		Pengajuan dan revisi anggaran sesuai prioritas program pemilu														
						Monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala														

Sasaran Strategis/ Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Kegiatan yang akan dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan												Perkiraan Biaya (Rp)	Pelaksana
						JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES		
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3.	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	1	Jumlah pelatihan teknis yang diselenggarakan	1 layanan	Pelaksanaan pelatihan teknis untuk anggota PPK, PPS, KPPS, dan PPDP												27.698.000	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum
						penguatan kapasitas teknis penyelenggara pemilu													
						Simulasi pelaksanaan tahapan pemilu untuk badan adhoc													
	4.	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	1	Jumlah sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilaksanakan	1 layanan	Sosialisasi tahapan pemilu kepada masyarakat dan pemangku kepentingan												165.825.000	Sub Bagian SDM dan Parmas
						Penyuluhan terkait regulasi pemilu kepada calon peserta													
						Bimbingan teknis pelaksanaan tahapan kepada badan adhoc													
	5	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu		Tingkat kesiapan sarana IT untuk mendukung pemilu	1 laporan	Identifikasi kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak pemilu												4.543.000	Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi
						Instalasi dan pengujian sistem IT untuk mendukung tahapan pemilu													
						Pemeliharaan infrastruktur jaringan dan server													
		Pengelolaan Sarana IT Pemilu		Persentase pemanfaatan sarana IT dalam proses pemilu	1 laporan	Operasionalisasi Sistem Informasi Pemilih (Sidalih)												32.608.000	Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi
						Monitoring kinerja dan ketersediaan sarana IT selama pemilu													
		Pembentukan Badan Adhoc		Persentase honorarium badan adhoc yang dibayarkan tepat waktu	1 laporan	Rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan PPDP												19.398.512.000	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
				Persentase badan adhoc yang telah dilatih sesuai standar	1 laporan	Pelaksanaan pelatihan teknis kepada badan adhoc													
						Pendistribusian honorarium kepada badan adhoc sesuai jadwal													
		Masa Kampanye Pemilu		Persentase kegiatan kampanye yang difasilitasi sesuai aturan	1 laporan	Pemberian fasilitas kampanye, seperti lokasi dan alat peraga												15.965.000	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum
				Tingkat penyelesaian pelanggaran kampanye yang ditangani	1 laporan	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kampanye													
						Penanganan pelanggaran kampanye secara cepat dan tepat													
		Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik Pemilu		Persentase logistik yang didistribusikan tepat waktu	1 laporan	Pengadaan kotak suara, bilik suara, dan perlengkapan TPS												1.885.897.000	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
				Jumlah pengadaan barang dan jasa yang selesai tepat waktu	1 laporan	Distribusi logistik pemilu ke daerah													
				Persentase laporan dokumentasi logistik yang disusun lengkap	1 laporan	Penyusunan laporan dokumentasi distribusi logistik													
		Pemungutan dan Penghitungan Suara		Persentase TPS yang siap menyelenggarakan pemungutan suara	1 laporan	Fasilitasi persiapan TPS untuk pemungutan suara												1.359.935.000	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum
				Tingkat pelaksanaan penghitungan suara sesuai prosedur	1 laporan	Pelaksanaan penghitungan suara sesuai prosedur yang berlaku													
				Jumlah evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan tahapan	1 laporan	Evaluasi pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara													
		Penetapan Hasil Pemilu		Persentase hasil pemilu yang ditetapkan sesuai jadwal	1 laporan	Penyampaian hasil pemilu kepada peserta secara transparan												7.772.000	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan

Sasaran Strategis/ Kegiatan			Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Kegiatan yang akan dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan												Perkiraan Biaya (Rp)	Pelaksana
						JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Jumlah sengketa hasil pemilu yang selesai tepat waktu	1 laporan	Penyelesaian sengketa hasil pemilu melalui mekanisme hukum														Hukum
					Penetapan hasil pemilu berdasarkan jadwal resmi														
II	Program Dukungan Manajemen																		
	1	Transparansi Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara di Lingkungan Setjen KPU (3355)	1	Jumlah Layanan Perkantoran Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1 layanan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan para Pegawai dan Uang Kehormatan Pejabat Negara												2.493.219.000	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
			2	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 laporan	Menyusun Laporan Sistem Akuntansi & Pelaporan Keuangan													
			3	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) yang tepat waktu dan valid	1 laporan	Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran													

Sasaran Strategis/ Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Kegiatan yang akan dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan												Perkiraan Biaya (Rp)	Pelaksana
						JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES		
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2 Terwujudnya Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan Kantor serta Dukungan Sarana dan Prasarana (3360)	1	Jumlah Layanan Prasarana Internal	1 layanan	Belanja Kebutuhan Sehari-hari													165.310.000	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
		2	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	1 laporan	Pembayaran Honor Operator Persediaan dan Aset Tetap														
		3	Jumlah Layanan Operasional Perkantoran	1 layanan	Pembayaran Operasional satker dan Honor Operator														
		4	Jumlah Layanan Pemeliharaan Kantor	1 layanan	Pembayaran Operasional Satker dan Honor Pegawai														

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
KPU KABUPATEN SOLOK SELATAN**

nit Organisasi
n Anggaran

: KPU Kabupaten Solok Selatan
: 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	2	3	4
1	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan, dan Alokasi Kursi	Rencana program dan anggaran disusun secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan	90%
		Rasio penyelesaian NPHD dan revisi anggaran tepat waktu	8 Kali
		Persentase produk hukum dan berita acara yang disahkan sesuai jadwal	85%
		Jumlah peserta sosialisasi dan bimbingan teknis yang tercapai	100%
		Persentase pembentukan badan adhoc yang memenuhi standar kualifikasi	100%
		Tingkat akurasi data pemilih yang terdaftar	90%
		Proses pencalonan selesai sesuai regulasi dan jadwal	100%
		Tingkat kepatuhan pelaksanaan kampanye terhadap regulasi	90%
		Rasio laporan audit dana kampanye yang selesai diverifikasi	100%
		Persentase rekapitulasi yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Rasio penyelesaian sengketa hukum pemilu yang difasilitasi	90%
		Tingkat ketersediaan logistik pemilu di TPS tepat waktu	100%
		Jumlah penyelenggara yang mengikuti pelatihan sesuai target	10 orang

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	2	3	4
		Tingkat pelaksanaan rapat kerja sesuai jadwal	90%
		Rasio perjalanan dinas yang sesuai perencanaan	100%
		Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana yang terawat	80%
		Ketersediaan BBM untuk operasional tepat waktu	100%
		Tingkat pelayanan administrasi yang sesuai standar	90%
		Rasio realisasi belanja modal yang sesuai rencana	100%
		Jumlah kelompok kerja yang terbentuk dan berfungsi optimal	5 Pokja
		Tingkat pembayaran honorarium yang tepat waktu	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Solok Selatan	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	78
4	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Solok Selatan yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 kali
5	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Solok Selatan	indek reformasi birokrasi yang mendapat nilai minimal B	B
6	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5 %

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	2	3	4
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%
7	Tersedianya data dan informasi kepegawaian Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	80%
8	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%
9	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
10	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	85%
11	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase pengisian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%
12	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	3 Lap
13	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase Arsip Inaktif yang dikelola Sesuai Aturan Kearsipan	87.5 %
14	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan yang dapat ditanggulangi	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	2	3	4
16	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Nilai Maturitas SPIP	3,4
17	Peningkatan kompetensi SDM di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%

Padang Aro, Januari 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
KETUA,

ADE KURNIA ZELLI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **ADE KURNIA ZELLI, B.Sc, ME**

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Solok Selatan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Padang Aro, 4 Januari 2024

Ketua
ADE KURNIA ZELLI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan berintegritas	Persentase mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%
		Indek Reformasi Birokrasi	77
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu serentak yang Demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	79,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	79,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	79,5%
		Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,25%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Persentase Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan Damai	100%
		Persentase Sangketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Solok Selatan	100%

No.	Kode	Program	Anggaran
1	076.1.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 15.987.364.000
2	076.1.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.130.544.000
Jumlah			Rp. 18.480.778.000

Padang Aro, 4 Januari 2024

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Solok Selatan**



ADE KURNIA ZELLI



Telp : -

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

Alamat Jl. Raya Sungai Lambai, Lubuk Gadang Selatan, Sangir

Email : kpukab.solokselatan@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **BENNY RINALDO, SH**

Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Solok Selatan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **ADE KURNIA ZELLI, B.Sc, ME**

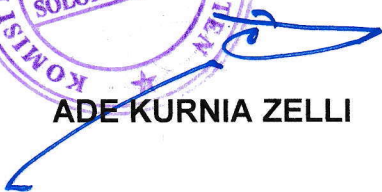
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Solok Selatan

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Padang Aro, 4 Januari 2024

Pihak Kedua,
Ketua

ADE KURNIA ZELLI

Pihak Pertama,
Sekretaris

BENNY RINALDO



PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan

Tahun Anggaran : 2024

No	Sararan Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan KPU Solok Selatan yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	a. Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	100%
		b. Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi penugasannya	
		c. Terlaksananya Reformasi Birokrasi	
		d. Terlaksananya Pembangunan Zona Integritas menuju WBM/WBBK	
2.	Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Terlaksananya semua kegiatan Tahapan Pemilu 2024 sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni :	100%
		a. Tersusunnya Perencanaan Pengelolaan Anggaran TA 2024	
		b. Terbentuknya Badan Ad Hoc	
		c. Terlaksananya Kampanye Peserta Pemilu	
		d. Tersedianya Logistik Pemilu tepat jumlah dan tepat waktu	
		e. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan dan Persentase KPU Solok Selatan yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	
		f. Terlaksananya Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara masif dan efektif.	
3.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
4.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU.	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	BB
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP

No.	Kode	Program	Anggaran
1	076.1.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 15.987.364.000
2	076.1.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.130.544.000
Jumlah			Rp. 18.480.778.000

Padang Aro, 4 Januari 2024

**Pihak Kedua,
Ketua Komisi Pemihan Umum
Kabupaten Solok Selatan**



ADE KURNIA ZELLI

**Pihak Pertama,
Sekretaris Komisi Pemihan Umum
Kabupaten Solok Selatan**



BENNY RINALDO